

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DESERTASI DOKTOR**



**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
PADA PRODUK-PRODUK HUKUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DI DIY**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

PENELITI:

**Eny Kusdarini, SH, M.Hum
NIDN: : 0004036006**

Dibiayai oleh DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA- 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, DIPA revisi 01 tanggal 03 Maret 2015. Skim: Penelitian Desertasi Doktor Tahun Anggaran 2015 Nomor: 062/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/II/2015 Tanggal 5 Februari 2015

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

Judul Kegiatan : Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : ENY KUSDARINI M.Hum.

B. NIDN : 0004036006

C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

D. Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

E. Nomor HP : 08122726326

F. Surel (e-mail) : eny_kusdarini@uny.ac.id

G. NIM : 10932009

H. Semester ke : 7

PT Penyelenggara : Universitas Islam Indonesia

Program Doktor : ILMU HUKUM

Nama Promotor : YOS JOHAN UTAMA

NIDN Promotor : 0010116202

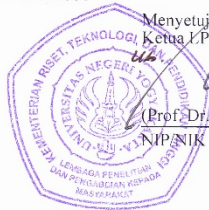
Biaya yang Diusulkan : Rp 41.907.500,00



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY
(Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag)
NIP/NIK 196203211989031001

Yogyakarta, 9 - 11 - 2015,
Ketua Peneliti,

(ENY KUSDARINI M.Hum.)
NIP/NIK 196003041986012001



Menyetujui,
Ketua LPPM UNY

(Prof. Dr. Anik Ghufroon)
NIP/NIK 196211111988031001

Ringkasan

Tujuan dari penelitian “Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini adalah untuk menganalisis rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY. Penelitian ini merupakan bagian disertasi yang menjawab rumusan masalah pertama dari disertasi yang berjudul “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, yuridis filosofis, dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. **Dokumentasi** dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum yang relevan dengan hal-hal yang diteliti yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan pusat maupun produk-produk hukum daerah yang berupa peraturan, keputusan, peraturan kebijakan, dan bahan hukum non primer. **Wawancara** dilakukan dengan para pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. **Observasi** dilakukan untuk melihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di wilayah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman tidak banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit dan belum menguraikan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasal dari produk-produk hukum daerah Sleman. Kota Yogyakarta sudah banyak produk hukum daerahnya, terutama yang berbentuk peraturan daerah yang telah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak peraturan daerahnya yang mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya, walaupun jumlah produk hukumnya belum sebanyak di Kabupaten Sleman dan Kota Yogya. Hal ini mempengaruhi implementasi asas-asas umum pemerintahan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan layanan perizinan di daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun pada dasarnya pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan dalam kebijakan layanan perizinan investasi sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa asas-asas yang belum dilaksanakan dengan baik.

Key Word: Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Produk-produk Hukum Daerah, Layanan Perizinan Investasi, Daerah Istimewa Yogyakarta

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karuniaNya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian Desertasi Doktor dengan judul “Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Di DIY”. Penelitian ini merupakan bagian dari Desertasi yang berjudul “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pelaksanaan penelitian ini didanai oleh DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA- 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015 Nomor: 062/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/II/2015 Tanggal 5 Februari 2015

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman tidak banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) secara eksplisit dan belum menguraikan secara rinci AUPB dalam ketentuan pasal-pasal dari produk-produk hukum daerah tersebut. Kota Yogyakarta sudah banyak produk hukum daerahnya, terutama yang berbentuk peraturan daerah yang telah merumuskan dan mengimplementasikan AUPB secara rinci ke dalam pasal-pasal produk hukum daerah. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak peraturan daerahnya yang mengimplementasikan AUPB dan menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya, walaupun masih ada Surat Keputusan Bupati yang belum mengimplementasikan AUPB. Hal ini mempengaruhi implementasi AUPB dalam pelaksanaan kebijakan layanan perizinan di daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun pada dasarnya pelaksanaan AUPB dalam kebijakan layanan perizinan investasi sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa asas-asas umum pemerintahan yang belum dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini tidak akan terlaksana dan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa trima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Anik Ghufro, selaku Ketua LPPM UNY yang telah memfasilitasi dan memberikan izin dalam penyelenggaraan penelitian ini;

2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag, selaku Dekan FIS UNY yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan penelitian ini;
3. Pejabat-pejabat di lingkungan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman;
4. Pejabat-pejabat di lingkungan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta; khususnya Bapak Darsono, M. Si selaku Kasi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Pejabat-pejabat di lingkungan Badan Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progu, khususnya Bapak Agung Kurniawan selaku Kepala BPMP2T, Sekretaris BPMP2T, dan pejabat-pejabat lain, yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini;
6. Pejabat-pejabat di lingkungan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu memberikan data yang diperlukan;
7. Para reviewer pada saat seminar proposal dan instrumen penelitian; serta seminar hasil penelitian yang telah memberikan masukan-masukan dalam pembuatan instrumen dan laporan penelitian;
8. Teman-teman kolega dari jurusan PKn dan Hukum UNY yang telah memberikan masukan dan saran-saran demi perbaikan laporan penelitian ini;
9. Mahasiswa PKn dan Hukum UNY yang telah membantu dalam perolehan data di wilayah penelitian; serta
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna walaupun sudah banyak masukan-masukan dari berbagai pihak. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca yang budiman. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan Laporan Penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan asalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hasil Penelitian/Deserasi Terdahulu.....	9
B. Konsep Negara Hukum Modern	13
C. Konsep Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	22
D. Pentingnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Layanan Publik Di Indonesia.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian.....	31
C. Sumber Bahan Penelitian.....	32
D. Langkah-langkah Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	34
A. Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Pada Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di DIY.....	34
1. Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.....	34
2. Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.....	40
3. Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.....	49
B. Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Pada Pelaksanaan Kebijakan Layanan Perizinan Investasi Di DIY.....	55
1. Implementasi AUPB Di Kabupaten Sleman.....	55
2. Implementasi AUPB Di Kota Yogyakarta.....	60
3. Implementasi AUPB Di Kabupaten Kulon Progo.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan Penelitian Dengan Desertai/ Penelitian Lain.....	12
Tabel 2.	Rumusan dan Implementasi AUPB Dalam Poduk Hukum Daerah Kabupaten Sleman.....	38
Tabel 3.	Rumusan dan Implementasi AUPB Dalam Poduk Hukum DaerahKota Yogyakarta.....	46
Tabel 4.	Rumusan dan Implementasi AUPB Dalam Poduk Hukum Daerah Kabupaten Kulon Progo.....	52
Tabel 5.	Karakteristik Rumusan dan Implementasi AUPB Pada Produk-Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Di DIY.....	54
Tabel 6.	Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan Di Kabupaten Sleman.....	57
Tabel 7.	Pelaksanaan Asas Keterbukaan Di Kabupaten Sleman Dari Sisi Kejelasan Prosedur Pengurusan Perizinan.....	58
Tabel 8.	Kesesuaian Waktu Yang Diumumkan Dengan Penyelesaian Proses PerizinanDi Kabupaten Sleman.....	59
Tabel 9.	Kesederhanaan Prosedure Pengurusan Izin Investasi Di Kabupaten Sleman.....	59
Tabel 10.	Kemudahan Akses Informasi yang Dibutuhkan Di Kabupaten Sleman.....	59
Tabel 11.	Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum dan Asas Keadilan Oleh Petugas Pelayanan Di Kota Yogyakarta.....	69
Tabel 12	Pelaksanaan Asas Profesionalitas Oleh Petugas Pelayanan Di Kota Yogyakarta.....	69
Tabel 13.	Pelaksanaan Asas Keterbukaan Di Kota Yogyakarta Dari Sisi Kejelasan Prosedur Pengurusan Perizinan.....	70
Tabel 14.	Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan Di Kota Yogyakarta	71
Tabel 15.	Kemudahan Akses Informasi yang Dibutuhkan Dalam Layanan Perizinan Di Kota Yogyakarta.....	71
Tabel 16.	Tanggapan Petugas Terhadap Pengaduan dari Pengguna Layanan Perizinan Investasi Di Kota Yogyakarta.....	72
Tabel 17.	Keadilan Petugas Dalam Melakukan Pelayanan Di Kabupaten Kulon Progo.....	75
Tabel 18.	Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum Oleh Petugas Pelayanan Di Kabupaten Kulon Progo.....	76
Tabel 19.	Pelaksanaan Asas Profesionalitas Di Kabupaten Kulon Progo.....	76
Tabel 20.	Pelaksanaan Asas Keterbukaan Di Kabupaten Kulon Progo.....	77
Tabel 21.	Kesederhanaan Prosedure Perizinan Investasi Di Kabupaten Kulon Progo.....	77
Tabel 22.	Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan Di Kabupaten Kulon Progo.....	78
Tabel 23.	Kenyamanan Lingkungan Fisik dari Segi Kebersihan, Kerapihan dan Keteraturan Tempat Pelayanan Di Kabupaten Kulon Progo.....	79
Tabel 24.	Tanggapan Petugas Terhadap Pengaduan dari Pengguna Layanan Perizinan Investasi Di Kabupaten Kulon Progo.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pembangunan terpusat yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru dan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kehidupan sosial yang demokratis dan berkeadilan mengakibatkan fundamental ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang birokratis dan cenderung korup telah menyebabkan krisis ekonomi dan krisis nasional yang berkepanjangan. Setelah Orde Baru jatuh dan dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 berimplikasi luas pada tatanan pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah. Pemerintahan tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan bersifat desentralisasi dan kepada daerah diberikan hak untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, alat administrasi negara yang berada pada pemerintahan daerah terutama daerah kabupaten/kota menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah. Alat administrasi negara dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan profesional, agar tidak merugikan warga masyarakat yang dilayaninya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Henk Addink (2010: 11-12) yang menyatakan bahwa ada tiga landasan dalam negara hukum modern, yakni: *the rule of law*, *democracy*, dan *good governance*.

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi, di antaranya adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya potensial, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas

kabupaten/kota, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan kewenangan-kewenangan lainnya.

Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU No 32 tahun 2004 meliputi 16 aspek kewenangan, di antaranya adalah penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi umum penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, serta kewenangan-kewenangan lainnya. Oleh karena itu pasca diberlakukannya tentang Pemerintahan Daerah tersebut, salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah kewenangan di bidang pengelolaan penanaman modal termasuk di dalamnya bidang perizinan investasi.

Dewasa ini penanaman modal (investasi langsung) baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri amat diperlukan untuk mensejahterakan rakyat di berbagai daerah di Indonesia, di samping itu karena dengan diberlakukannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka kebutuhan keuangan daerah sebagian juga harus dipenuhi oleh daerah sendiri, sehingga iklim investasi di daerah harus ditumbuhkembangkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah dan meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan pengaturan di bidang penanaman modal termasuk perizinan investasi supaya dapat mensejahterakan rakyat di daerah dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Pengaturan di bidang perizinan investasi di daerah diperlukan juga untuk menata agar investasi yang berada di daerah tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat seperti terjadinya pencemaran lingkungan fisik, sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan lainnya. Sebagai contoh akibat dari kekuranghati-hatian dalam pengaturan di bidang perizinan investasi di daerah dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan dapat merugikan warga masyarakat di daerah di mana usaha itu dijalankan. Di samping itu akibat tidak diperhatikannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengaturan perizinan di daerah, bisa menjadikan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur di daerah. Oleh karena itu kewenangan pengaturan kebijakan perizinan investasi di daerah juga

harus memperhatikan asas-asas kehati-hatian dan memandang jauh ke depan, mengingat bahwa perizinan merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan kegiatan di daerah supaya tidak merugikan masyarakat akibat dari rusaknya lingkungan sebagai dampak dari adanya kegiatan investasi di daerah.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik diperlukan sebagai pedoman dan arahan bagi alat administrasi negara di daerah dalam mengeluarkan perizinan investasi yang dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang baik, seperti pengaturan dalam Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya yang terkait dengan perizinan investasi. Apabila pengaturan dalam bentuk produk-produk hukum daerah seperti peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, surat keputusan bupati/walikota dan peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) daerah di bidang perizinan investasi itu tidak dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana maka akan dapat merugikan bagi masyarakat yang terkena dampak akibat pemberian izin usaha yang tidak dilakukan dengan bijaksana dan mengindahkan asas kehati-hatian serta asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. Oleh karena itu kewenangan pengaturan kebijakan perizinan investasi di daerah juga harus memperhatikan asas-asas kehati-hatian dan memandang jauh ke depan, mengingat bahwa perizinan merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan kegiatan di daerah supaya tidak merugikan masyarakat akibat dari rusaknya lingkungan sebagai dampak dari adanya kegiatan investasi di daerah.

Menurut Saut Poltak Panjaitan dalam tulisannya yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Investasi Menurut Sistem Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Sistem Undang-Undang Penanaman Modal” (<http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/36> tanggal akses 30 April 2013), kewenangan pemerintah daerah harus ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang sejalan dengan UU Penanaman Modal, karena realitasnya investasi itu ada dan berlangsung di daerah. Pengaturan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut harus dilakukan dengan mengindahkan asas legalitas dan juga mengindahkan asas-asas yang berlaku didalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Produk-produk hukum daerah yang terkait dengan perizinan investasi maupun pemberian pelayanan di bidangan perizinan investasi perlu dibuat dengan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan dengan baik supaya

tidak merugikan masyarakat secara luas dan menghindarkan diri dari tuntutan masyarakat di pengadilan akibat tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

Sampai saat ini fakta-fakta menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan dalam pelayanan publik di Indonesia, seperti dilaporkan dalam Seminar Hasil Kajian Model Kelembagaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Bidang Air Bersih, Kebersihan dan Ruang Publik) yang diadakan Staff Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Bappenas pada tanggal 28 Januari 2008, bahwa permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi dalam pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi situasi problematis, berupa : struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada kepentingan penguasa atau birokrat (*power culture*); belum terbentuk budaya pelayanan publik (*service delivery culture*); tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam pelayanan publik (*cost of uncertainty*); budaya patron-client dan budaya afiliasi yang mengarah kepada moral hazard; rendahnya kompetensi para birokrat. Selain itu berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Pelayanan Publik Di Era Reformasi yang diadakan oleh Bappenas (www.bappenas.go.id, tanggal akses 4 Januari 2012), pelayanan publik cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsifitas, dan tidak representatif. Banyak contoh yang ditemukan bahwa pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan jasa yang dikelola pemerintah tidak memuaskan masyarakat, bahkan kalah bersaing dengan pelayanan pihak swasta. Pada hal negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik maka pemerintah harus melakukan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk dengan mengindahkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* di Indonesia, di antaranya di tuangkan dalam ketentuan Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN mengenai asas umum penyelenggaraan negara, ketentuan Pasal 20 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam ketentuan Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang terdiri dari empat (4) wilayah kabupaten yakni kabupaten: Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo, serta satu (1) wilayah kota yakni: Kota Yogyakarta. Sebagaimana wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerahnya Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan asas otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Salah satu pelaksanaan asas otonomi ini adalah pelaksanaan kewenangan di bidang administrasi penanaman modal yakni pemberian perizinan investasi yang ada di lingkungan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan wewenang untuk mengeluarkan produk-produk hukum terkait dengan penyelenggaraan perizinan investasi di wilayahnya.

Penelitian tentang “Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini penting dan dipandang urgen, mengingat bahwa kebijakan layanan publik harus dilaksanakan oleh para pelaksana layanan publik termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk. Hal itu juga untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 3 UU Pelayanan Publik, yakni terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Di samping itu pelaksana layanan publik harus membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakannya seiring dengan harapan dan tuntutan warga masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik. Untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara termasuk juga penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kajian ini penting juga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara termasuk penduduk selaku pengguna layanan dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota di Indonesia, terutama pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam

implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi utamanya di DIY adalah implementasi dalam kebijakan perizinan investasi juga harus diindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik supaya investasi di daerah bisa mensejahterakan rakyat di daerah dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah dan menyuburkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di daerah. Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, berkaitan erat dengan perwujudan good governance.

Agus Dwiyanto (2006:35) mengemukakan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan good governance dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa membangun good governance bukan hanya sebuah mitos tetapi dapat menjadi suatu kenyataan, sehingga perlu diteliti Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil contoh kasus tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Kulon Progo. Ketiga wilayah hukum pemerintah daerah ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah wilayah yang dijadikan sampel ini sudah melebihi setengah dari jumlah wilayah kabupaten/kota di DIY. Pertimbangan lain bahwa tiga wilayah tersebut merupakan wilayah yang investasinya potensial untuk berkembang. Di Daerah Kulon Progo potensi investasi yang berkembang yakni dengan akan didirikannya pelabuhan laut dan bandar udara juga rencana adanya investasi produksi pasir besi, sehingga ada potensi-potensi investasi yang akan berkembang di wilayah tersebut. Sedangkan di Kabupaten Sleman saat ini sudah berkembang investasi-investasi yang dalam tahun 2013 sudah ada jenis-jenis perizinan yang dilayani di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sejumlah 77 jenis perizinan yang sebagian besar adalah jenis-jenis perizinan yang terkait dengan perizinan investasi. Sedangkan Kota Yogyakarta pada tahun 2013 menangani jenis-jenis perizinan yang kewenangan penyelenggaraannya ada Dinas Perizinan Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 ada 34 perizinan dan sebagian besar adalah perizinan investasi. Pengaturan tentang kebijakan layanan perizinan investasi yang dituangkan dalam produk-produk hukum daerah harus mengimplementasikan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, dikhawatirkan apabila tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik akan menyebabkan rusaknya lingkungan di DIY dan menyebabkan marak terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan urgensi penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada pokok permasalahan mengenai:

“Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta”

2. Rumusan Masalah

Setelah melihat pokok permasalahan tersebut di muka, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) pada produk-produk hukum kebijakan pelayanan publik perizinan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimanakah implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengkaji, menjelaskan dan menganalisis tentang:

1. Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) pada produk-produk hukum kebijakan pelayanan publik perizinan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara utamanya teori-teori yang berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penyelenggara negara termasuk di dalamnya para pengambil kebijakan publik utamanya kebijakan publik perizinan investasi baik yang ada pada pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah propinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik di daerahnya, baik dalam mengeluarkan produk hukum baik *regeling*, *beschikking*, maupun *beleidsregels*.

Manfaat praktis lainnya, diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan masukan bagi alat administrasi negara selaku pelayan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dengan menggunakan sarana-sarana hukum yang dibuat dan cara-cara pembuatannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum administrasi negara termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga diharapkan juga nantinya mereka terhindar dari tuntutan hukum pihak masyarakat yang merasa dirugikan haknya dikemudian hari, terkait dengan pelayanan publik yang mereka lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian/Desertasi Terdahulu

Penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik terutama layanan publik perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan secara mendalam dan sistematis dalam bentuk desertasi. Memang di dalam literature Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia pembahasan dan penelitian-penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dilakukan oleh para pakar sudah banyak dilakukan, namun demikian belum banyak yang membahas dalam kaitannya dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian SF Marbun (2001) “Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia” membahas tentang terbentuknya AAUPL dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Namun demikian desertasi tersebut memfokuskan diri pada produk-produk hukum Pemerintah Daerah Propinsi DIY dan tidak menyoroti asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan investasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY. Desertasi tersebut menyatakan bahwa tugas pemerintah pada negara hukum modern termasuk pemerintah Indonesia adalah mensejahterakan warga negaranya. Tugas ini menimbulkan konsekuensi bahwa peran, tugas dan tanggungjawab pemerintah semakin besar dalam memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Sejalan dengan tugas itu pemerintah diwajibkan berpegang pada asas legalitas, yang tidak hanya diartikan tunduk pada undang-undang tertulis semata, akan tetapi juga pada hukum tidak tertulis utamanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Apalagi dalam negara hukum modern (Welfare State) peranan pemerintahnya menjadi sangat luas, sehingga dengan alasan untuk membangun kesejahteraan warganya diberikan wewenang bebas (kebijaksanaan) oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah, sehingga semakin terbuka peluang bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan kebijaksanaan (*beleidregel*). Untuk itu diperlukan asas-asas umum pemerintahan

yang baik dalam pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut. Hal ini diperlukan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Sementara itu penelitian Ana Erliyana (2004) menganalisis Keputusan Presiden Republik Indonesia dari tahun 1987 sampai dengan 1998. Penelitian tersebut secara khusus mengupas tentang pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas larangan melampaui wewenang dalam Keputusan Presiden yang terbit pada masa pemerintahan Presiden Soeharto periode 1987-1998. Dinyatakan dalam penelitian tersebut bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik lebih cenderung sebagai penjabaran suatu perjanjian yang dapat diserahkan atau dipindahkan kepada pejabat administrasi negara lainnya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh suatu jabatan secara yuridis. Orientasinya harus kepada peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum, karena berdasarkan kedua hal tersebut maka kepatuhan terhadap batas-batas jabatan umum dapat dipaksakan bukan bergantung pada kesadaran atau itikad baik pejabat. Ana Erliyana tidak membahas perlunya asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan Yuliandri (2007) meneliti “Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam rangka Pembuatan Undang-undang Berkelanjutan”. Penelitian tersebut mengetengahkan asas-asas umum pembentukan perundang-undangan yang baik di Indonesia yang terdiri asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material. Asas-asas yang bersifat formal yakni (1) asas: tujuan yang jelas (*beginselen van duidelijke doelstelling*) di dalam teknis pembentukan peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam bagian konsiderans (menimbang) termasuk bagian penjelasan; (2) asas organ/lembaga yang tepat (*beginselen van het juiste orgaan*); (3) asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*); (4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); (5) asas konsensus (*het beginselen van consensus*).

Lis Febrianda dalam disertasinya (2009) meneliti “Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Birokrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” yang memfokuskan diri pada pelayanan

publik bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Padang. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil belum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Di samping itu dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam masyarakat alat administrasi negara/aparat pemerintah masih menggunakan legalistik positivistik dan tidak mampu mengambil tindakan diskresi. Ditemukan juga bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 belum memuat tentang asas-asas umum pemerintahan yang layak.

Penelitian terakhir yang ditulis oleh Ridwan dalam disertasinya (2013) “Diskresi dan Tanggungjawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia” mengkaji tentang diskresi yang melekat pada organ pemerintah harus memperhatikan norma pemerintahan (*bestuursnorm*) dan norma perilaku (*gedragsnorm*). Penggunaan wewenang yang melanggar norma pemerintahan dan norma perilaku membawa konsekuensi tanggungjawab sesuai dengan asas “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”. Dikaji juga dalam penelitian tersebut, bahwa penggunaan diskresi dapat diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas legalitas tidak memadai. Pengguna diskresi dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat jika diskresi yang digunakan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, utamanya asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan bertindak sewenang-wenang atas asas rasionalitas. Dalam kajian penelitian Ridwan ditemukan bahwa penggunaan diskresi di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk peraturan kebijakan ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Desertasi Ridwan ini juga berbeda dengan desertasi yang akan ditulis karena desertasi tersebut tidak memfokuskan pada pembahasan tentang perlunya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian yang merupakan bagian dari disertasi yang ditulis ini dengan penelitian/desertasi yang pernah ditulis oleh penulis lain sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Perbedaan Penelitian Implementasi AUPB Dalam Kebijakan Pelayanan
Publik Perizinan Investasi di DIY Dengan Penelitian/Desertasi Lain

No	Penulis	Judul	Perbedaan
1	SF Marbun	Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia	Membahas tentang terbentuknya AAUPL dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan DIY, namun tidak memfokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik
2	Ana Erliyana	Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia dari tahun 1987 -1998	Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Keppres RI tahun 1987 s/d 1998
3	Yuliandri	Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-undang Berkelanjutan	Mengkaji dan menganalisis asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru
4	Lis Febrianda	Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Birokrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara	Mengkaji dan menganalisis asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil khususnya di Kota Padang
5	Ridwan	Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia	Mengkaji pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembuatan diskresi yang melekat pada organ pemerintah
6	Penelitian/Deserta siyang direncanakan	Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta	Memfokuskan pada implementasi AUPB dalam pembuatan produk-produk hukum daerah pada kebijakan pelayanan publik perizinan investasi

Sumber: Berbagai Penelitian/Desertasi

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa penelitian yang merupakan bagian dari disertasi ini berbeda dengan penelitian/disertasi yang terdahulu karena memfokuskan pada implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di DIY yang berbentuk regeling seperti peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, *beschikking* seperti Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Walikota, dan *beleidsregel* seperti surat edaran bupati, surat edaran walikota atau produk-produk hukum daerah lainnya di wilayah DIY terutama yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan investasi.

B. Konsep Negara Hukum Modern/Negara Kesejahteraan

SF. Marbun dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia” (2003, hlm:1), menyatakan bahwa di dalam sebuah negara hukum, pasti mengalami berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, utamanya untuk mencapai tujuan negara. Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, terutama persoalan kewenangan atau wewenang, dan secara historis persoalan ini telah muncul sejak filosof Yunani Kuno Plato menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan, demikianlah diucapkan oleh Nicollo Machiavelli. Sementara itu, Hans Kelsen (2010, hlm:3) menyatakan bahwa hukum itu sendiri diartikan sebagai suatu tatanan perbuatan manusia, yang merupakan seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa mustahil untuk menangkap hakekat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hakekat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.

Thomas Aquinas, seorang filosof terbesar abad pertengahan sebagaimana disunting oleh Frans magnis Suseno dalam buku “Kuasa dan Moral” (1995, hlm:4-5), mengemukakan uraian tentang Hukum Kodrat dalam Summa Theologiae. Ada tiga macam hukum dan hubungan yang terdapat dalam hukum-hukum itu. Pertama, Lex Aeterna (Hukum Abadi) atau kebijaksanaan Ilahi sendiri sejauh merupakan dasar ciptaan. Lex Aeterna itu dipartisipasi oleh ciptaan dalam kodratnya, karena

kodrat makhluk-makhluk mencerminkan Kebijakan Yang Menciptakannya. Bahwa makhluk itu ada dan makhluk berbentuk atau berkodrat sebagaimana adanya karena itulah yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Kedua, Lex Naturalis (Hukum Kodrat) merupakan dasar dari tuntutan moral. Hukum Kodrat ini menghubungkan antara hukum moral dengan Hukum Kodrat. Thomas Aquinas mendasarkan norma-norma moral pada wewenang mutlak sang Pencipta, dan sekaligus menunjukkan rasionalitasnya. Rasionalitas ini tuntutan-tuntutan moral terletak dalam kenyataan, bahwa tuntutan-tuntutan itu sesuai, dan berdasarkan keperluan kodrat manusia. Itu berarti bahwa hidup manusia sedemikian rupa hingga ia dapat berkembang, dapat membangun, dan menemukan identitasnya, serta dapat menjadi bahagia. Di dalam bahasa modern Hukum Kodrat menuntut agar manusia hidup sesuai dengan martabatnya. Pada akar hukum moral, Thomas Aquinas menolak segala paham kewajiban yang tidak dapat dilegitimasi secara rasional, dari kebutuhan manusia sendiri yang sebenarnya. Ketiga, adalah hukum buatan manusia yang dikenal dengan Lex Humana. Hukum buatan manusia ini hanya berlaku apabila dimensinya berdasarkan Hukum Kodrat, isinya harus sesuai dengan Hukum Kodrat, dan pihak yang memasang hukum itu memiliki wewenang yang juga berdasarkan Hukum Kodrat.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Thomas Aquinas secara radikal menolak kekuasaan sebagai dasar hukum. Suatu peraturan hanya bersifat hukum (hanya mengikat), apabila isinya dapat dilegitimasikan secara rasional dari Hukum Kodrat. Suatu “hukum” yang bertentangan dengan Hukum Kodrat, menurut Thomas Aquinas tidak memiliki status hukum, melainkan merupakan *corruption legis*, atau suatu “penghancuran hukum”. Ia menuntut secara radikal etis penggunaan kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa membenarkan dirinya sendiri dengan kekuatan fisik dan social tetapi tidak memuat suatu wewenang. Bagi Thomas tidak ada seorang manusiapun yang secara alami mempunyai wewenang atas manusia lain.

Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya “Filsafat Sebagai Ilmu Kritis” (1993, hlm: 46-47) kodrat itu dimodifikasi oleh kekhasan situasi dan kondisi, dan tidak boleh disamakan dengan yang alamiah. Apa yang sesuai dengan kodrat atau sesuai dengan tujuan akhir tidak ditentukan oleh kodrat buta, melainkan harus dicari melalui akal budi. Jadi untuk menetapkan manakah norma-norma moral kongkret, atau apa arti prinsip-prinsip moral dasar berhadapan sebuah masalah kongkret, penilaian sendiri kita dituntut.

Philipus M. Hadjondalam buku kumpulan tulisan “Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia” dengan editor Bagir Manan (1996, hlm:75-76) mengemukakan bahwa konsep negara dan kekuasaan, tidak bisa dilepaskan dari konsep “negara hukum”. Konsep negara hukum, merupakan konsep yang sangat populer yang terpengaruh dari dua konsep yang sangat populer yakni, “*rechtsstaat*” dalam bahasa Jerman dan “*the rule of law*” dalam bahasa Inggris. Selanjutnya Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa istilah “*rechtsstaat*” mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Istilah “*the rule of law*” mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul “*Introduction to the study of the law of the constitution*”. Melihat latar belakang konsep dan sistem hukum penopang dari dua istilah tersebut, terdapat perbedaan pengertian “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak ada permasalahan lagi antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Namun demikian dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem hukumnya sendiri.

Frans magnis Suseno dalam bukunya “Kuasa dan Mora”¹ (1995, hlm: 79-80) mengemukakan bahwa idé “*rechtsstaat*” yang lahir di Jerman dan diikuti oleh Belanda, pada akhir abad ke XVIII meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas, yaitu semua hukum harus positif yang berarti bahwa hukum harus dibentuk secara sadar, dan diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum pada rakyat. Oleh karena itu pemerintah, selaku penguasa Negara harus melaksanakan ide “*rechtsstaat*” ini. Di dalam bukunya tentang “Pemerintahan Para raja” yang dialamatkan kepada Raja Hugo dari Cyprus, Tomas Aquinas sebagaimana disunting oleh Frans magnis Suseno (1995, hlm:6) mengemukakan tentang perbedaan antara pemerintahan yang sah, dan pemerintahan yang disebutnya despotik. Pemerintahan yang despotik adalah pemerintahan yang hanya berdasarkan kekuasaan saja, sedangkan pemerintahan politik yang sah harus sesuai dengan kodrat masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang bebas. Apabila kesatuan orang-orang bebas dibimbing kearah kesejahteraan umum masyarakat, pemerintahan ini akan bersifat betul dan adil sebagaimana sudah semestinya bagi orang-orang yang bebas. Akan tetapi apabila pimpinan tidak mengusahakan kesejahteraan umum masyarakat, melainkan keuntungan pribadi sang pemimpin, maka pemerintahan itu tidak adil dan bertentangan dengan Hukum Kodrat. Kekuasaan pada pokoknya hanya benar dan

baik sejauh berjalan dalam batas-batas hukum yang presis, sedangkan hukum sendiri harus menunjang tujuan Negara, yaitu mengusahakan kesejahteraan umum dan bukan kepentingan pribadi dari penguasa Negara atau kelompok-kelompok tertentu. Thomas, menyatakan bahwa yang boleh disebut raja bukanlah segenap orang yang kebetulan duduk di atas tahta, melainkan hanyalah penguasa yang memerintah “demi kesejahteraan umum masyarakat bukan demi kepentingannya sendiri”. Setiap raja atau penguasa sah menduduki jabatannya berdasarkan suatu perjanjian dengan masyarakat. Apabila raja menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingannya sendiri, ia melanggar perjanjian, dengan demikian perjanjian itu menjadi tidak berlaku lagi.

Theo Huijbers dalam bukunya “Filsafat Hukum” (1995, hlm: 21-22), menjelaskan bahwa sebetulnya dalam tradisi filsafat, terutama filsafat hukum, perdebatan dan refleksi antara hukum dan negara ini sudah terjadi sejak lama yakni dengan telah ditemukannya pikiran-pikiran hukum di Cina kuno. Filsafat Konfusius (abad ke-5 SM) sebagian besar merupakan suatu filsafat tentang aturan Negara yang bijaksana melalui hukum (Li). Titik tolak pemikiran tersebut adalah kebiasaan ritual dan sakral yang telah lama menjamin kelangsungan hidup di negeri itu. Konfusius dan pemikir-pemikir lain berusaha mencari dasar bagi suatu praktek hukum yang baik dan bijaksana. Namun pemikiran modern tentang hukum tidak berakar dari filsafat Konfusius, melainkan dalam tradisi filsafat Yunani Kuno, yang diteruskan ke Eropa selama beberapa abad, dan pada zaman sekarang ini telah menjadi kerangka berpikir segala bangsa di dunia. Oleh karena itu sebetulnya pemikiran tentang hukum merupakan lanjutan dari pemikiran pada zaman dulu, akan tetapi dalam lintasan sejarah pemikiran-pemikiran tentang hukum itu berubah-ubah sesuai perkembangan kebudayaan dan semangat zaman, dari mulai zaman klasik (abad ke-6 SM s/d abad ke 5 M); Abad Pertengahan (abad ke-5 M s/d abad ke 15 M); Zaman Baru dan Modern (abad ke-15 M s/d ke-20 M), Masa sezaman (abad ke 20 M), bahkan sampai masa kini.

Selanjutnya Theo Huijbers (1995, hlm: 23) mengemukakan bahwa pada masa Yunani kuno, para filosof besar sudah mulai insyaf tentang peranan manusia dalam membentuk hukum. Sokrates, menuntut supaya para penegak hukum mengindahkan keadilan sebagai nilai yang melebihi manusia. Plato dan Aristoteles, sudah mulai mempertimbangkan manakah aturan yang adil yang harus ditujui oleh hukum, walaupun mereka tetap taat pada tuntutan-tuntutan alam. Plato, dalam bukunya

Politeia melukiskan model tentang suatu Negara yang adil, di dalam Negara semacam itu tiap-tiap golongan (filsuf, tentara, pekerja) mempunyai tempat alamiahnya. Muncul keadilan apabila tiap-tiap kelompok berbuat sesuai dengan tempat dan tugasnya. Dalam bukunya *Nomoi*, Plato juga memberikan petunjuk bagi dibentuknya suatu tata hukum yang membawa orang-orang kepada kesempurnaan. Ajaran Plato ini berpedoman pada pengalaman-pengalamannya tentang praktek bernegara pada zamannya, seperti tuntutan supaya peraturan-peraturan yang berlaku ditulis dalam suatu buku perundangan untuk menghindari penyelewengan dari hukum yang adil.

Theo Huijbers (1995, hlm: 23-24) juga menyunting tulisan Aristoteles tentang negara dan hukum dalam bukunya *Politika*, dijelaskan bahwa manusia menurut wujudnya merupakan “makhluk polis” (*zoon politicon*). Oleh sebab itu seorang warga polis harus ikut serta dalam kegiatan politik, semua orang harus taat pada hukum polis, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurutnya hukum harus dibagi dalam dua kelompok, pertama, hukum alam atau hukum kodrat yang mencerminkan aturan alam, dan merupakan suatu hukum yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah karena kaitannya dengan aturan alam. Kedua, hukum positif yang dibuat oleh manusia. Menurutnya pembentukan hukum itu harus selalu dibimbing oleh rasa keadilan, yakni tentang rasa yang baik dan pantas bagi orang-orang yang hidup bersama. Namun susunan hukum menurut prinsip keadilan menyusul susunan orang-orang sebagai warga negara menurut jabatan, yang dianggap sesuatu yang alamiah, karenanya berlakulah suatu prinsip keadilan bahwa kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. Sementara itu SF Marbun (2003, hlm: 1-2) mengemukakan bahwa antara hukum dan keadilan selalu dihadapkan pada kekuasaan, di mana dalam kepustakaan ilmu negara asal-usul kekuasaan selalu dihubungkan dengan kedaulatan, dan kedaulatan merupakan sumber kekuasaan tertinggi negara yang tidak berasal dan tidak berada di bawah kekuasaan lain .

Sementara itu Soehino dalam bukunya “Ilmu Negara” (1991, hlm: 52-160) menyatakan bahwa teori-teori tentang kedaulatan, di antaranya adalah kedaulatan Tuhan berkembang pada abad pertengahan yang dalam perkembangannya berhubungan erat dengan perkembangan agama Kristen yang timbul pada saat itu dengan para penganutnya antara lain Thomas Aquinas, Agustinus, dan Marsilius. Selain itu muncul pula teori tentang kedaulatan negara, di mana menurut para penganutnya di antaranya George Jellinek dan Jean Bodin, menyatakan bahwa

kedaulatan itu tidak terletak pada Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh para penganut teori Kedaulatan Tuhan, melainkan ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk pada hukum. Di samping itu muncul pula teori tentang kedaulatan rakyat yang muncul pada abad ke 17-18, yang dipelopori oleh JJ Rosseau.

Mengenai Jean-Jacques Rousseau, Frans Magnis Suseno dalam buku “Filsafat Sebagai Ilmu Kritis” (1993, hlm: 78-81) memaparkan bahwa pada tahun 1749 akademi di kota Dijon mengumumkan sayembara tentang karangan terbaik mengenai pertanyaan “Apakah kemajuan dalam bidang seni dan ilmu-ilmu pengetahuan memberikan sumbangan untuk memurnikan moralitas? Kemudian Rousseau teruskan untuk mengikuti sayembara itu dan menang. Pada zaman itu, Perancis di abad ke 18 dianggap mencapai puncak peradaban Barat. Rasionalisme nampaknya berkuasa mutlak. Raja Perancis Louis XIV berkuasa mutlak, dengan keyakinannya yang absolute, para bangsawan bebas pajak, sementara rakyat hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Hal itulah yang mengusik Rousseau untuk mengikuti sayembara setelah pengembaraannya diberbagai tempat selama sembilan tahun. Dia sadar bahwa kebudayaan Perancis bukanlah puncak peradaban, melainkan peradaban yang busuk. Menurutnya yang sungguh-sungguh manusiawi adalah moralitas yang tidak dibuat-buat tetapi alami, maka kemudian dia berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan manusia kepada martabat alamiahnya, bagaimana ia dapat dibebaskan dari keterasingannya itu? Jawaban itulah yang kemudian diberikan oleh Rousseau dalam teori kehendak umum yang ditulisnya dalam buku *Contrat Sociale*. Agar manusia dalam masyarakat dan negara tidak terasing, hanya ada satu jalan : kekuasaan raja dan para bangsawan harus ditumbangkan dan kedaulatan rakyat ditegakkan. Kedaulatan rakyat berarti : yang berdaulat terhadap rakyat, hanyalah rakyat sendiri. Tak ada orang atau kelompok orang yang berhak untuk meletakkan hukumnya pada rakyat. Hukum hanya sah apabila ditetapkan oleh kehendak rakyat yang berdaulat sendiri. Ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih dewan rakyat yang mewakili rakyat baik yang dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh seluruh warga negara yang sudah dewasa. Dewan-dewan rakyat inilah mempunyai kedaulatan.

Ni'matul Huda dalam buku *Ilmu Negara* (2010, hlm: 188-189)) menyatakan bahwa ajaran kedaulatan dikemukakan oleh kaum Monarchomachen yang kemudian

dilanjutkan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Menurut John Locke rakyat menyerahkan kekuasaannya pada negara, sehingga negara mempunyai kekuasaan yang besar, namun demikian kekuasaan itu ada batasnya. Batas itu merupakan hak alamiah dari manusia yang telah melekat sejak lahir dan negara tidak boleh mengambil atau mengurangi hak alamiah ini, yakni: hak atas kehidupan, kemerdekaan dan hak milik pribadi. Hak ini adalah hak asasi manusia. John Locke menyatakan bahwa negara didirikan justru untuk melindungi hak-hak manusia .

Mengenai Thomas Aquinas, Frans Magnis Suseno dalam buku “Kuasa dan Moral” (1995, hlm: 5-6) menyatakan bahwa pada akar hukum moral Thomas Aquinas menolak segala paham kewajiban yang tidak dapat dilegitimasi secara rasional dari kebutuhan manusia sendiri yang sebenarnya. Prinsip itu diterapkan secara tegas pada hukum buatan manusia, *Lex Humana*. Menurut Thomas suatu hukum buatan manusia hanya berlaku apabila menurut dua dimensinya berdasarkan hukum kodrat : isinya harus sesuai dengan hukum kodrat, dan pihak yang memasang hukum itu memiliki wewenangnya berdasarkan hukum kodrat. Dengan demikian Thomas Aquinas secara radikal menolak kekuasaan sebagai dasar hukum. Suatu peraturan hanya bersifat hukum, artinya hanya mengikat apabila isinya dapat dilegitimasikan secara rasional dari hukum kodrat. Suatu “hukum” yang bertentangan dengan hukum kodrat, tidak memiliki status hukum, melainkan merupakan *corruptio legis*, suatu “penghancuran hukum”. Jadi Thomas Aquinas secara radikal menuntut legitimasi etis penggunaan kekuasaan. Kekuasaan tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Kekuasaan hanyalah suatu kenyataan fisik dan social, tetapi tidak dapat memuat suatu wewenang. Bagi Thomas tak ada seorang manusia yang secara asasi mempunyai wewenang atas manusia lain, yang berwenang hanyalah satu, Sang Hyang Wenang atau Sang Pencipta, dan segenap wewenang atas manusia harus mendapat haknya dari wewenang yang pertama itu. Menurutny hukum kodrat adalah tolok ukur legitimasi segala tindakan kekuasaan. Suatu ketentuan penguasa yang tidak sesuai dengan hukum kodrat tidak mengikat. Filsafat Thomas Aquinas membuka fakfa kekuasaan terhadap kritik dan tuntutan pertanggungjawaban, sekaligus memastikan bahwa segenap kekuasaan manusia terbatas sifatnya dan tidak mutlak. Kekuasaan adalah fungsional demi kesejahteraan masing-masing orang.

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Utreht dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia” (1994, hlm: 26-37, lihat juga SF Marbun

2003, hlm: 269-271)), berkembang konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*, *welvaartstaat*, *wehlfahrtstaat*), yang lahir pada permulaan abad ke 20 (dua puluh) pada bagian kedua abad ke 19 (sembilan belas) dan berkembang di Eropa Barat. Konsep ini menempatkan lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara modern bertugas untuk menjaga keamanan warga negaranya dalam arti yang seluas-luasnya, pemerintah dituntut sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warganya. Konsep negara kesejahteraan lahir pada saat aliran-aliran sosialis di Eropa Barat menimbulkan soal sosial (*“social kwestie”*). Pada waktu itu kedudukan sosial dan ekonomi kaum buruh telah menjadi buruk akibat perbudakan yang dilakukan oleh majikannya. Lahirnya konsep negara kesejahteraan ini menghendaki bahwa sistem ekonomi liberal yang sama sekali tidak mengenal pembatasan, tidak boleh diteruskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini menjadi sebab bagi pemerintah di nagara hukum modern diberi wewenang untuk ikut serta campur tangan dalam segenap aspek kehidupan warga negaranya, sejak diperkenalkannya konsep *welfare state* maka keikutsertaan pemerintah dalam campur tangan dalam kehidupan warga negara menjadi sangat luas.

Philipus M. Hadjon (2007, hlm: 77) menjelaskan bahwa tujuan pokok dari negara modern tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, namun juga untuk mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat, AM Donner menyebutnya dengan istilah *social rechtsstaat*, Lemaire menyebutnya *bestuurzorg*, dalam hal ini negara berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau *welvaarsstaat*, atau *verzorgingsstaat*. Konsep Negara Kesejahteraan ini kemudian menimbulkan dilema karena dalam negara tersebut mengharuskan setiap tindakan/perbuatan badan/pejabat atau alat tata usaha negara harus berdasarkan atas hukum dan bersamaan dengan itu kepada alat administrasi negara disertai peran, tugas, dan tanggungjawab yang luas dan kompleks menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan warga negara. SF Marbun dalam buku “Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif diIndonesia” (2003, hlm: 269-271) menuliskan bahwa konsekuensi dari konsepsi *welfare state* dan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat ini menyebabkan tugas dan wewenang serta tanggungjawab alat administrasi negara semakin berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif karena bertambahnya tugas-tugas baru dan semakin berkembangnya tugas-tugas lama. Di dalam merealisasikan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan

warganya, alat administrasi negara harus berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting negara hukum. Asas ini di Belanda dikenal dengan *wetmatigheid van bestuur* yang kemudian berkembang menjadi asas *rechtmatigheid van bestuur* atau di Perancis dikenal dengan *asas le principe de la le'galite*, di Jerman dikenal dengan asas *Gesetzmassigkeit der Verwaltung* atau di Inggris asas *the rule of law*. Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan/perbuatan alat administrasi negara harus berdasarkan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui atribusi. Setiap tindakan/perbuatan alat administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), sewenang-wenang (*wellekeur/abus de droit*) dan menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) .

Utrecht (1994, hlm: 30-31) mengemukakan bahwa perkembangan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam negara modern inilah yang kemudian memunculkan pemikiran tentang adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus diperhatikan oleh alat administrasi negara, apalagi kepada mereka juga diberikan wewenang berdasarkan asas *freie Ermessen* (bahasa Jerman) atau *pouvoir discretionnaire* (bahasa Perancis), yaitu suatu asas kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul secara tiba-tiba di mana hukum tertulis tidak mengaturnya dan serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Ridwan HR dalam buku “Hukum Administrasi Negara” (2011, hlm: 230-231) menuliskan juga bahwa tugas penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat ini sering disebut dengan istilah “*bestuurszorg*”. Tugas ini membawa konsekuensi bahwa alat administrasi negara diberikan wewenang untuk mengatur atas inisiatif sendiri yang dikenal dengan nama *freies ermessen* (bahasa Jerman), di Perancis dikenal dengan nama “*pouvoir discretionare*” yaitu suatu asas kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri dalam penyelesaian masalah-masalah peraturan perundang-undangannya belum ada. Sebetulnya perbuatan administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga dalam keadaan tertentu apabila peraturan perundang-undangan belum mengaturnya ataupun kalau sudah mengatur akan tetapi tidak terlalu jelas pengaturan tersebut (masih bersifat samar dan sumir), barulah diperbolehkan penggunaan asas ini. Namun demikian *freies ermessen* ini terkadang menimbulkan berbagai benturan antara pemerintah dan masyarakat/warga negara karena munculnya peluang dalam bentuk *onrechtmatig overheidsdaad*,

detournement de pouvoir, ataupun dalam bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan dari tindakan pemerintah yang mengakibatkan terampasnya hak asasi warga negara. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi warga negara dengan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar perbuatan alat administrasi negara tidak menimbulkan penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

C. Konsep Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Di Indonesia konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik pada masa Orde Baru memang belum banyak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis. Hal ini bisa dibenarkan karena asas-asas umum pemerintahan yang baik awalnya merupakan norma hukum tidak tertulis. Namun demikian untuk melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab administrasi negara selaku alat pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik memerlukan kekuasaan/wewenang yang besar dan potensial untuk disalahgunakan (*detournement de pouvoir*), digunakan dengan sewenang-wenang (*abus de droit/ willekeur*), dan bahkan digunakan bertentangan dengan hukum termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (SF Marbun, 2001: 5). Di dalam melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab administrasi negara tersebut diperlukan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis supaya administrasi negara tidak dianggap melanggar hukum.

Seringkali alat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik (*public service*) untuk menyelesaikan masalah-masalah konkrit yang terjadi dalam masyarakat terbentur pada tidak adanya aturan-aturan yang menjadi dasar untuk penyelesaian masalah tersebut atau walaupun ada aturan-aturan itu sudah tidak dapat dipakai sebagai dasar dalam penyelesaian masalah karena sudah ketinggalan jaman. Oleh karena itu supaya alat administrasi negara dapat menjalankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat dengan baik maka kepadanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang menjadi tanggungjawab dan wewenangnya dengan *freies ermesen*, yakni suatu asas kebebasan bertindak atau kebijaksanaan atas inisiatif sendiri yang dipunyai oleh alat administrasi negara untuk menyelesaikan masalah-masalah konkrit dalam masyarakat atas inisiatif sendiri dalam bidang tugas yang diembannya selaku

alat Negara. Namun demikian di dalam pelaksanaan asas kebebasan bertindak atau kebijaksanaan atas inisiatif sendiri ini, Alat Administrasi Negara harus mengindahkan rambu-rambu yang ada sehingga perbuatan yang dia lakukan untuk pelaksanaan asas *freies Ermessen* tidak melanggar hukum (*ultra vires*) dan perbuatannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu patokan yang bisa dipakai untuk menilai apakah asas *freies Ermessen* sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak adalah rumusan-rumusan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang awalnya ada dalam Hukum Administrasi Negara tidak tertulis.

Di Indonesia, setelah runtuhnya Orde Baru, asas-asas umum pemerintahan yang baik banyak yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis yang selalu berkembang dalam setiap peraturan perundang-undangan. Hal ini tampak dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan meliputi: **asas kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; dan akuntabilitas** (7 asas). Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas: **kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas** (8 asas). Ketentuan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengemukakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: **kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan** (14 asas).

Pada awalnya AUPB merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara tidak tertulis dan kemudian setelah era runtuhnya orde baru banyak yang dituangkan dan diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau Hukum Administrasi Negara tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini berkembang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini

bisa dipahami mengingat asas-asas ini semestinya berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan masyarakat sehingga semestinya tidak ada rumusan baku dan limitatif terhadap keberadaan asas-asas ini. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2014 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang awalnya merupakan hukum tidak tertulis, di Indonesia kemudian diakui keberadaannya secara formal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan konsep yang merupakan terjemahan dari "*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*" disebut dengan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik dan disingkat dengan istilah AUPB. Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik pada awalnya berisikan pedoman yang harus digunakan oleh alat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya dan juga harus digunakan oleh hakim (administrasi/tata usaha negara) untuk menguji keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat administrasi negara yang disengketakan melalui pengadilan¹. Perkembangan selanjutnya konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak hanya diberlakukan untuk badan-badan atau lembaga-lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sebagai pelayan publik di negara-negara yang menganut paham *welfare state* dan lembaga yudikatif untuk menilai apakah tindakan-tindakan badan-badan pemerintahan tersebut sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada perkembangan selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) asas-asas ini semestinya tidak hanya dikaitkan dengan kekuasaan pemerintahan (*eksekutif*) yang dijalankan oleh alat administrasi negara, akan tetapi juga diberlakukan untuk cabang-cabang kekuasaan lainnya seperti pembentuk undang-undang (*legislatif*) dan kekuasaan penegakan hukum (*yudicatif*). Bahkan Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman² menyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik bisa dianggap sebagai salah satu dari tiga dasar landasan negara modern, di mana perkembangan masing-masing landasan tersebut di mulai dari sejarah yang berbeda dan hal ini seringkali dikaitkan dengan perkembangan negara dan ketiganya saat ini

¹Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, 2010. dalam bukunya "Sourcebook Human Right & Good Governance" pada bagian 1.1

² Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, 2010. dalam bukunya "*Sourcebook Human Right & Good Governance*" pada bagian 1.1

masih mengalami perkembangan. Ketiga landasan tersebut adalah penegakan hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik.

Mengenai pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sedangkan mengenai lingkup/scope tata pemerintahan yang baik, Henk Adink dkk mengemukakan bahwa hal itu berkaitan dengan waktu atau saat di mana tata pemerintahan yang baik tersebut diterapkan. Suatu perbedaan akan tampak di antara dua pendekatan yang berbeda yakni pendekatan “kelembagaan” dan pendekatan “fungsional”. Pendekatan fungsional mengingatkan kita pada perbedaan penting antara tata pemerintahan yang baik (sebagai bagian dari hukum publik) dan pengelolaan perusahaan (sebagai bagian dari hukum privat). Poin yang kedua berkenaan dengan arti kata “tata pemerintahan” dalam frase “tata pemerintahan yang baik”, sebaiknya kita memberi arti kata ini secara lebih luas dari pada pengertiannya yang sempit. Hal ini dapat dilihat dari paparan Henk Addink³ yang menyatakan bahwa:

Related to the “scope” of Good Governance – wich deals with when the norms of Good Governance apply – a distinction will be drawn between two different approaches to this issue, which we will call “institutional” and “functional”. The functional approach alerts as to an important distinction between Good Governance (as part of public law) and Corporate Governance (as part of private law). A second point concerns the meaning of the word “Governance” in the phrase “Good Governance”. We will suggest that it is best to give this word a broader rather than a narrower meaning.

Sementara itu Safri Nugraha dkk⁴ mengartikan *good governance* sebagai “kepemerintahan yang baik” dan mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik atau *good governance* dapat dilihat sebagai kata-kata atau istilah biasa yaitu pemerintahan yang baik atau label konsep khususnya pada konsep Asas-asas

³Ibid, hlm 19

⁴Lihat Safri Nugroho dkk, hlm 7-8

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan *good governance* 1990s. Di dalam perkembangannya prinsip-prinsip *good governance* 1990s bergeser ke arah atau diperkaya oleh penerapan atau *best practice* berbagai prinsip manajemen. Gejala ini menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memang selalu berkembang pada setiap waktu untuk dapat dipakai sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gejala perkembangan konsep *good governance* sebetulnya merupakan aspek dinamis dari administrasi negara pada setiap saat yang selalu dihadapkan pada tantangan untuk melakukan perubahan atau cara di bidang administrasi negara utamanya pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam konsep ini mengandung makna ditinggalkannya monopoli pemerintah terhadap penyelenggaraan negara. Di konsep ini ada makna “*partnership*” atau kerja sama antara sektor publik yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah/negara, dengan sektor swasta atau dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu dalam konsep *good governance* terkandung makna bahwa ada hubungan yang sinergis secara proporsional antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hubungan sinergis antara ketiganya mewujudkan konsep *good governance* harus mengindahkan prasarat (*conditio sine qua non*) nilai-nilai dasar universal maupun nilai-nilai dasar kondisional, seperti: supremasi hukum, transparansi, partisipasi, profesionalitas, sensitivitas, dan akuntabilitas. Adapun nilai-nilai kondisional disesuaikan dengan karakter dan budaya masyarakat di suatu negara. Di dalam konteks Indonesia, perpaduan antara karakteristik universal dan karakteristik kondisional, di antaranya disebut sebagai asas-asas penyelenggaraan negara, yang terdiri atas asas: kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas⁵. Asas-asas inilah yang kemudian dituangkan dalam hukum tertulis di Indonesia, yakni Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

⁵Lihat Safri Nugraha, hlm: 10-11

D. Pentingnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Layanan Publik Di Indonesia

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipakai sebagai alat untuk proses (mengajukan) banding bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah untuk yang dianggap merugikan dirinya. Asas-asas ini juga dapat dipakai oleh pengadilan untuk menilai tindakan pemerintah. Di samping itu asas-asas umum pemerintahan yang baik juga termasuk di dalam prinsip-prinsip hukum umum. Asas-asas umum pemerintahan ini juga merupakan salah satu patokan yang bisa dipakai untuk menilai apakah asas *freies Ermessen* (kebebasan bertindak) yang dipunyai alat administrasi negara sudah dilaksanakan dengan baik.

Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia merupakan terjemahan dari *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* dari Negara Belanda. Konsep ini pada awalnya berisikan pedoman yang harus digunakan oleh alat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya dan juga harus digunakan oleh hakim (administrasi/tata usaha negara) untuk menguji keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat administrasi negara yang disengketakan melalui pengadilan⁶. Perkembangan selanjutnya konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak hanya diberlakukan untuk badan-badan atau lembaga-lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sebagai pelayan publik di negara-negara yang menganut paham *welfare state* dan lembaga yudikatif untuk menilai apakah tindakan-tindakan badan-badan pemerintahan tersebut sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pada perkembangan selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) asas-asas ini semestinya tidak hanya dikaitkan dengan kekuasaan pemerintahan (*eksekutif*) yang dijalankan oleh alat administrasi negara, akan tetapi juga diberlakukan untuk cabang-cabang kekuasaan lainnya seperti pembentuk undang-undang (*legislatif*) dan kekuasaan penegakan hukum (*yudikatif*) dan di Indonesia malahan diberlakukan juga untuk instansi-instansi selain instansi pemerintah bahkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik diberlakukan untuk korporasi-korporasi yang menyelenggarakan pelayanan publik.

⁶ Ibid

Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman⁷ menyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik bisa dianggap sebagai salah satu dari satu tiga dasar landasan negara modern, di mana perkembangan masing-masing landasan tersebut di mulai dari sejarah yang berbeda dan hal ini seringkali dikaitkan dengan perkembangan negara dan ketiganya saat ini masih mengalami perkembangan. Ketiga landasan tersebut adalah penegakan hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik.

Konsep *good governance* di Indonesia berkembang pada tahun 1990 an, di mana dalam perkembangannya penerapan prinsip-prinsip *good governance* kemudian agak bergeser ke arah atau diperkaya dengan berbagai prinsip manajemen yang diadvokasi sejak manajemen klasik yang berdasar *human behavior* yang mendasarkan diri pada manajemen berdasarkan lingkungan sampai manajemen modern⁸. Pada saat ini konsep tata pemerintahan yang baik telah dikembangkan di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Namun demikian terdapat permasalahan-permasalahan yang berbeda pada tingkatan-tingkatan ini berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat. Pada tingkat internasional permasalahan yang muncul dalam lingkup keuangan internasional. Sedangkan pada lingkup nasional, yakni masih banyaknya situasi tata pemerintahan yang buruk terkait dengan masalah korupsi, tindakan mal-administrasi, dan kesalahan-kesalahan di dalam manajemen pemerintahan. Dewasa ini konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik telah berkembang. Perkembangan konsep ini terkait dengan tuntutan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja melainkan juga melibatkan pihak swasta. Mengenai konsep *Good Governance*, Henk Addink mengemukakan bahwa tata pemerintahan yang baik merupakan kepatutan dari penguasa negara/alat administrasi negara secara transparans dan partisipatif, bahkan lebih dari itu. Pada hakekatnya, pemerintahan yang baik ini berkenaan dengan pemenuhan tiga tugas dasar pemerintahan, yaitu untuk menjamin keamanan seseorang dan masyarakat, mengatur kerangka kerja yang efektif dan

⁷ Henk Addink, et.al, 2010. dalam bukunya "*Sourcebook Human Right & Good Governance*" pada bagian 1.1

⁸Safri Nugraha, dkk, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik, 2007. Jakarta: BPHN, hal: 7-8

bertanggungjawab untuk sektor publik, dan mendukung tujuan ekonomi dan sosial negara sesuai harapan-harapan penduduk⁹.

Mengenai lingkup/scope tata pemerintahan yang baik, sebagaimana telah dikemukakan oleh Henk Addink yang telah diuraikan di muka, hal itu berkaitan dengan waktu atau saat di mana tata pemerintahan yang baik tersebut diterapkan. Suatu perbedaan akan tampak di antara dua pendekatan yang berbeda yakni pendekatan “kelembagaan” dan pendekatan “fungsional”. Pendekatan fungsional mengingatkan kita pada perbedaan penting antara tata pemerintahan yang baik (sebagai bagian dari hukum publik) dan pengelolaan perusahaan (sebagai bagian dari hukum privat). Poin yang kedua berkenaan dengan arti kata “tata pemerintahan” dalam frase “tata pemerintahan yang baik”, sebaiknya kita memberi arti kata ini secara lebih luas dari pada pengertiannya yang sempit.

Henk Adink juga mengemukakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan asas-asas/prinsip-prinsip hukum dan merupakan asas-asas/prinsip-prinsip kebijakan. Diadakan pembedaan karena mempunyai akibat dari sisi hukum tetapi relevan juga dalam efek kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Henk Addink, dkk yang mengemukakan bahwa:

A question which is related to this point is: are Principles of Good Governance legal principles or policy principles? The answers is that the Principles of Good Governance are both. We make a different because of the different in legal effect, but the policy effect is also relevant.

Untuk itu dapat dikemukakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebetulnya merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dan juga merupakan prinsip-prinsip sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan investasi di daerah, aparat pelayanan publik di daerah juga harus mengindahkan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang pada saat ini telah

⁹ Henk Adink, et.al, *Sourcebook HUMAN RIHGT & GOOD GOVERNANCE*, SIM Special, Utrecht, 2010, hlm: 18-19. Dinyatakan dalam buku tersebut bahwa “*Good Governance is the proper use of the government’s powers in a transparent and participative way, but it is more. In essence it concerns also the fulfillment of three elementary tasks of government: to guarantee the security of person and society, to manage an effective and accountable framework for the public sector, and to promote the economic and social aims of the country in accordance with the wishes of the population*”.

dituangkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara enumeratif, artinya aparat pelayan publik terutama aparat pelayanan perizinan investasi harus melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun asas-asas lain yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan pelayanan publik dan keberadaannya telah diakui oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahkan asas-asas umum pemerintahan lain yang belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis yang pada saat ini telah berkembang pada masyarakat lokal di daerah, harus dindahkan pula mengingat asas-asas ini selalu berkembang dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), yuridis filosofis, dan pendekatan yuridis sosiologissertamengkaji dan menganalisis berbagai kebijakan/tindakan hukum dalam bentuk produk hukum daerah yang berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari dikeluarkannya keputusan tentang perizinan investasi di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulonprogo. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan diri pada produk-produk hukum daerah yang berbentuk peraturan (*regelings*), seperti: peraturan daerah, peraturan bupati/walikota; Keputusan (*beschikkings*), seperti: surat keputusan bupati/walikota; dan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), seperti: surat edaran bupati/walikota, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

B. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum daerah Pemda Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi dasar dan sarana administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pelayan publik di bidang perizinan investasi, yakni produk hukum yang berupa :

- a) Peraturan perundang-undangan (*regelings*) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
- b) Keputusan administrasi negara (*beschikkings*) yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah yang ada Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
- c) Peraturan kebijaksanaan (*beleidsregels*) yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah yang ada Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;

- d) Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pejabat-pejabat di lingkungan Kantor Biro/Bagian Hukum dan juga pejabat-pejabat di lingkungan Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Investasi Kabupaten Sleman; Kantor Biro/Bagian Hukum dan Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta; Kantor Biro/Bagian Hukum dan juga pejabat-pejabat di lingkungan Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan pengeluaran tiga bentuk produk hukum (**peraturan, keputusan, dan peraturan kebijakan**) yang dipakai sebagai dasar kebijakan pelayanan publik perizinan investasi.

Di samping itu subjek dalam penelitian ini adalah pengguna layanan perizinan investasi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, masing-masing sejumlah 30 pengguna layanan yang ditentukan secara acak.

C. Sumber Bahan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki¹⁰ menyatakan bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum yang relevan dengan hal-hal yang diteliti. Bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan maupun keputusan/ketetapan administrasi negara baik yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, disertasi, jurnal-jurnal dan bahan-bahan lainnya yang memberikan petunjuk dan inspirasi dalam penelitian ini. Bahan-bahan non hukum adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pelayanan publik bidang perizinan investasi di Indonesia.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 141

D. Langkah-langkah Penelitian & Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah penelitian dan teknik pengumpulan data dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari buku-buku, disertasi-disertasi, jurnal-jurnal yang relevan dan produk-produk hukum dari pemerintah pusat yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi;
2. Melakukan **wawancara** dengan pejabat-pejabat terkait di wilayah penelitian untuk mengetahui bagaimana pembuatan produk hukum yang dipakai sebagai kebijakan perizinan investasi;
3. Melakukan kajian dan analisis produk-produk hukum baik yang berupa *regelings*, *beschikkings*, dan *beleidsregel* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo, untuk memetakan produk-produk hukum mana yang sudah dan belum merumuskan serta mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di wilayahnya;
4. Wawancara dengan para pengguna layanan perijinan investasi di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta;
5. Observasi untuk melihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di lapangan;
6. Menganalisis hasil penelitian dari semua sumber-sumber bahan yang telah terkumpul baik dari dokumentasi, wawancara maupun observasi;
7. Proses terakhir dari penelitian ini adalah pembuatan draft laporan hasil penelitian yang merupakan bagian dari penelitian disertasi yang berjudul “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Selain itu juga dibuat draft artikel ilmiah mengenai implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum pemerintah daerah di DIY yang rencananya akan di muat dalam jurnal internasional atau jurnal hukum nasional yang terakreditasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Pada Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di DIY

1. Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Pada saat penelitian ini dilakukan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan investasi di Kabupaten Sleman seperti halnya juga implementasi pada pelayanan publik bidang perizinan investasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi kebijakan perizinan investasi di Kabupaten Sleman mengacu juga pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikarenakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2014.

Pada saat penelitian ini dilakukan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya bertindak sebagai lembaga koordinasi, tidak berhak membuat kebijakan dan pengaturan terhadap kebijakan perizinan investasi di Kabupaten Sleman. Hal ini terkait dengan kebijakan pengaturan tentang kewenangan pemerintah (pusat), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas menghendaki bahwa kepada daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (pusat). Prinsip nyata dan bertanggung jawab menghendaki bahwa daerah dalam melaksanakan otonominya untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. Kabupaten Sleman dalam membuat kebijakan perizinan investasi juga mengacu dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

menjadi kewenangannya, yakni ketentuan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pelayanan administrasi penanaman modal (termasuk di dalamnya pelayanan perizinan investasi) dalam lingkup kabupaten/kota adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Sebagaimana kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga membuat kebijakan perizinan investasi yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dituangkan dalam berbagai bentuk produk hukum daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman, dan Keputusan Bupati Sleman.

Pada saat penelitian ini dilaksanakan Peraturan perundang-undangan dari pusat terkait dengan perizinan investasi yang menjadi dasar dari implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. Sedangkan peraturan perundang-undangan pusat lainnya yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; dan berbagai Peraturan Kepala BKPM yang mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal termasuk perizinan investasi seperti: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Di samping itu implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.

Beberapa contoh Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang terkait dengan pengaturan kebijakan perizinan investasi di Kabupaten Sleman yang diambil secara acak, yakni:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Setelah diadakan kajian dan analisis dengan cara mencermati isi dari ketentuan yang dimuat dalam peraturan-peraturan daerah Kabupaten Sleman yang dijadikan contoh tersebut secara eksplisit belum terlihat perumusan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dapat dikatakan belum terlihat implementasi dalam kebijakan perizinan investasi pada kebijakan yang berupa peraturan daerah

Kabupaten Sleman secara eksplisit¹¹. Walaupun setelah dicermati dan dianalisis sebetulnya secara implisit peraturan-peraturan daerah Kabupaten Sleman tersebut juga belum menguraikan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalamnya.

Demikian juga beberapa contoh kebijakan perizinan investasi dalam bentuk Peraturan Bupati Sleman, yakni:

- 1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, setelah dicermati secara eksplisit belum mengimplementasikan AUPB;
- 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, setelah dikaji juga belum mengimplementasikan AUPB;
- 3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern secara eksplisit juga belum mencantumkan AUPB;
- 4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 5) Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB;
- 6) Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB.

Setelah dicermati, dikaji dan dianalisis Peraturan Bupati Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman yang diambil sebagai contoh tersebut juga belum merumuskan secara eksplisit asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Secara implisit produk-produk hukum yang berupa Peraturan Bupati Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman tersebut juga belum menguraikan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

¹¹Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang pejabat di lingkungan Kantor Penguatan, Penyertaan dan Penanaman Modal (KP3M) yang pada saat ini berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik belum diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman. Namun demikian berdasarkan keterangan dari salah seorang pejabat di lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman secara implisit asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah terimplementasi dalam produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman.

Sebagai contoh analisis terhadap produk hukum daerah Kabupaten Sleman yang berbentuk peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan mengatur tentang penyelenggaraan Izin Gangguan di Kabupaten Sleman. Dasar pertimbangan dari dikeluarkannya peraturan daerah tersebut di antaranya adalah bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan. Di dalam dasar pertimbangan peraturan daerah ini secara implisit sudah terkandung implementasi asas kepentingan umum dan asas pelestarian lingkungan, namun demikian asas-asas tersebut tidak diurai dan dirumuskan dalam ketentuan pasal-pasal bagian batang tubuh dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Izin Gangguan.

Peraturan mengenai izin bangunan ini seharusnya dipakai untuk mengarahkan warga yang akan mendirikan suatu usaha agar tidak merugikan warga masyarakat yang berada dan bertempat tinggal di daerah di mana usaha tersebut akan didirikan. Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengeluarkan izin gangguan kepada warga yang memohon izin gangguan secara filosofi ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi atau yang diderita warga masyarakat apabila usaha yang akan dilakukan itu nantinya menimbulkan kerugian bagi warga sekitar.

Agar supaya lebih jelas analisis dan kajian terhadap produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati tersebut dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Rumusan dan Implementasi AUPB Dalam Poduk Hukum Daerah
Kabupaten Sleman

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Impementasi AUPB Pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Sleman
1	Perda Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum
2	Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, secara implisit namun sumir & samar-samar menyiratkan implementasi asas kepentingan umum

3	Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB dan secara implisit belum menyiratkan implementasi AUPB
4	Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Secara eksplisit dalam Pasal 2 memuat rumusan dan mengimplementasikan asas keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, kelestarian lingkungan, persaingan sehat dan kemanfaatan. Namun asas-asas tersebut tidak diuraikan lagi ke dalam pasal-pasal lainnya.
5	Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum, ketertiban dalam Pasal 2, 5 dan 6
6	Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas kelestarian lingkungan,
7	Perda Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung	Secara eksplisit dalam Pasal 2 memuat rumusan dan implementasi asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya dan secara implisit mengimplementasikan asas ketertiban, kepentingan umum, dan asas kelestarian lingkungan yang diuraikan dalam Pasal 3, 7, 9, 15, 19, 24, dan 26
8	Perda Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum, ketertiban, dan asas kelestarian lingkungan dalam berbagai pasal di dalamnya
9	Perda Kabupaten Sleman No. 16 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Industri	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB dan secara implisit belum menyiratkan implementasi AUPB
10	Perda Kabupaten Sleman No. 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas tertib penyelenggaraan negara
11	Perbup Sleman No. 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas kepastian hukum yang tertuang dalam berbagai pasal
12	Perbup Sleman No. 22 Tahun	Secara eksplisit belum merumuskan

	2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah,;	AUPB, secara implisit menyiratkan implementasi asas akuntabilitas dan asas keprofesionalan
13	Perbup Sleman No. 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern	Secara eksplisit belum merumuskan AUPB, secara implisit menyiratkan implementasi asas kepentingan umum
14	Perbup Sleman No. 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Secara eksplisit belum merumuskan AUPB, secara sumir dan samar menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas keprofesionalan
15	Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB	Secara eksplisit belum merumuskan AUPB, secara implisit belum menyiratkan implementasi AUPB
16	Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB.	Secara eksplisit belum merumuskan AUPB, secara implisit belum menyiratkan implementasi AUPB

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Sleman

2. Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta

Kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta dituangkan dalam berbagai produk hukum yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Berbagai peraturan perundang-undangan pusat terkait dengan penanaman modal termasuk perizinan investasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk Peraturan Daerah kota Yogyakarta maupun Peraturan Wali Kota Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan dari pusat terkait dengan perizinan investasi yang menjadi dasar dari implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat penelitian ini dilakukan, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. Sedangkan peraturan perundang-undangan pusat lainnya yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; dan berbagai Peraturan Kepala BKPM yang mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal termasuk perizinan investasi seperti: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Di samping itu implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.

Terkait dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perizinan investasi di Kota Yogyakarta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya bertindak sebagai lembaga koordinasi, tidak berhak membuat kebijakan dan pengaturan terhadap kebijakan perizinan investasi di Kota Yogyakarta. Hal ini terkait dengan kebijakan pengaturan tentang kewenangan pemerintah (pusat), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas menghendaki bahwa kepada daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (pusat). Prinsip nyata dan bertanggung jawab menghendaki bahwa daerah dalam melaksanakan otonominya untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban

yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan ketentuan pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pelayanan administrasi penanaman modal (termasuk di dalamnya perizinan investasi) dalam lingkup kabupaten/kota adalah urusan wajib yang menjadi kewenangannya.

Kebijakan administrasi penanaman modal termasuk di dalamnya perizinan investasi di kabupaten/kota di Indonesia mendasarkan diri pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Kota Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah kabupaten/kota di Indonesia dalam melaksanakan otonomi daerahnya mengacu pada kebijakan-kebijakan yang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagaimana telah dijelaskan di muka. Kebijakan pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam berbagai produk hukum daerah sudah menuangkan implementasi terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Untuk mengkaji dan menganalisis rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam produk hukum daerah Kota Yogyakarta dikemukakan beberapa contoh produk hukum kebijakan pelayanan perizinan investasi yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang diambil secara acak. Kajian dan analisis dilakukan untuk melihat rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam produk hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta baik secara eksplisit maupun secara implisit dan uraian asas-asas umum tersebut ke dalam rumusan pasal-pasal Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Di antara Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang dikaji dan dianalisis yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering. Setelah dikaji dan dianalisis secara implisit Peraturan daerah tersebut sudah mengimplementasikan dan merumuskan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 9 yang telah mengimplementasikan asas kepentingan umum yang di dalamnya;
- 2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, secara implisit sudah merumuskan dan sudah megimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di antara asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah asas ketepatan waktu yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3, asas

keprofesionalan dan asas partisipatif dalam ketentuan pasal 6. Asas kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban secara implisit tersirat dan terurai dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11.

- 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, secara implisit sudah menyiratkan rumusan dan implementasi asas-asas umum yang baik seperti asas profesionalitas yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 3, asas akuntabilitas yang secara implisit dituangkan dalam ketentuan Pasal 10. Asas kepastian hukum yang dituangkan dalam Pasal 16. Asas keterbukaan tertuang dan terurai dalam Pasal 20;
- 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan secara implisit telah menyiratkan rumusan dan implementasi asas keterbukaan dan akuntabilitas, serta asas keprofesionalan yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban tersirat dalam ketentuan pasal 9 dan Pasal 10;
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan sudah merumuskan dan mengimplementasikan AUPB dalam produk hukum ini, yaitu: asas keterbukaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tersirat dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6; asas kepentingan umum dan asas keterbukaan tersirat dalam ketentuan Pasal 7 dan 8; asas ketepatan waktu tersirat dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 14; dan asas profesionalitas yang tersirat dalam ketentuan Pasal 14 dan 15;
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan sudah merumuskan dan mengimplementasikan secara implisit asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13 dan Pasal 14;
- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging. Peraturan daerah ini telah merumuskan dan mengimplementasikan secara implisit asas kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3. Asas keprofesionalan tersirat dalam ketentuan Pasal 4. Asas keprofesionalan tersirat dalam Pasal 6, di samping itu dalam ketentuan Pasal 6 ini juga tersirat adanya asas kepentingan umum, di sampingitu asas kepentingan umum tersirat juga dalam ketentuan Pasal 7 dan 8. Asas

keprofesionalan dan asas keterbukaan tersirat juga dalam ketentuan Pasal 12, 13, dan 14;

- 8) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Peraturan daerah ini secara eksplisit sudah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Kepariwisata (di Yogyakarta) diselenggarakan berdasarkan asas:

- a) manfaat;
- b) kekeluargaan;
- c) pemerataan;
- d) keseimbangan;
- e) kemandirian;
- f) kelestarian;
- g) partisipatif;
- h) berkelanjutan;
- i) demokratis;
- j) kesetaraan;
- k) kesatuan; dan
- l) profesionalisme.

Asas-asas umum tersebut kemudian diurai ke dalam rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010. Sebagai contoh asas manfaat, asas pemerataan, asas keseimbangan, asas berkelanjutan dan asas kesatuan secara implisit diuraikan dirumuskan ke dalam Pasal 3. Pasal 4 secara tidak langsung menyiratkan rumusan asas kekeluargaan, asas berkelanjutan, asas pemerataan dan juga asas keseimbangan dan asas kesatuan. Pasal 13 secara tidak langsung menderifasikan asas manfaat, asas kelestarian, berkelanjutan, dan asas keseimbangan. Pasal 14, 15 dan Pasal 19 secara implisit merumuskan dan mengimplementasikan asas manfaat. Pasal 24, 25, 26, dan 27 secara tersirat merumuskan dan mengimplementasikan asas manfaat dan keseimbangan. Pasal 29 secara implisit juga merumuskan dan mengimplementasikan asas kemandirian, kemanfaatan, pemerataan dan partisipatif;

- 9) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, secara implisit telah merumuskan dan mengimplementasikan asas kepentingan umum yang merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini tampak dalam ketentuan Pasal 12, 14, 15, dan 16. Di samping itu Pasal-pasal tersebut juga merumuskan secara implisit dan

mengimplementasikan asas keprofesionalan dan asas fasilitas khusus bagi kelompok rentan. Rumusan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut juga tersirat dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19. Di samping itu Pasal 20 menyiratkan rumusan dan implementasi asas keseimbangan;

- 10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, secara implisit sudah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini tampak dalam ketentuan Pasal 3 yang menyiratkan rumusan dan implementasi dari asas kepentingan umum dan asas keprofesionalan.

Setelah diadakan kajian dan analisis terhadap peraturan daerah- peraturan daerah Kota Yogyakarta tersebut terlihat bahwa produk-produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang berupa peraturan daerah sudah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan sudah diuraikan secara eksplisit maupun implisit di dalamnya.

Sedangkan untuk kebijakan perizinan investasi yang dituangkan dalam bentuk peraturan walikota, secara acak diambil contoh yaitu:

- 1) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- 2) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 3) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 4) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket;
- 5) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 6) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan;
- 7) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;

- 8) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta;
- 9) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008; dan
- 10) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).

Setelah dicermati, dikaji dan dianalisis, produk-produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi yang berupa peraturan walikota tersebut di muka belum merumuskan secara terurai dan eksplisit asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalamnya, walaupun secara implisit asas-asas tersebut sudah dirumuskan dalam beberapa Peraturan Walikota Yogyakarta. Sebagai contoh analisis rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).

Hasil ringkas kajian dan analisis terhadap rumusan dan implementasi AUPB pada produk-produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 3
Rumusan dan Implementasi AUPB Dalam Produk Hukum Daerah
Kota Yogyakarta

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Daerah Kota Yogyakarta
1	Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas pelestarian daya dukung lingkungan pada bagian menimbang, asas profesionalitas dalam Pasal 3 ayat 1, asas kepentingan dalam Pasal 9 ayat (5).
2	Perda Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta No. 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas ketepatan waktu, asas keprofesionalan dan asas partisipatif dalam Pasal 2 ayat 2, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 17
3	Perda Kota Yogyakarta	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB,

	No. 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi,	namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas, kepastian hukum, dan kepentingan umum, pada bagian menimbang, Pasal 4, 11, 12, 15, dan Pasal 16
4	Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas keterbukaan dan akuntabilitas, transparansi, keprofesionalan, ketertiban, kepentingan umum dan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Pasal 12, 16, 7, 18, dan 19
5	Perda Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas keterbukaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan umum, keterbukaan, ketepatan waktu dan asas profesionalitas dalam Pasal 8, 24, 30
6	Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam ketentuan Pasal Pasal 9 ayat 1, dan Pasal 22
7	Perda Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas kepentingan umum dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keprofesionalan, dan asas kepentingan umum dalam Pasal 2, 3,4,5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, dan 23
8	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.	Secara eksplisit sudah merumuskan menguraikan dan mencantumkan AUPB dalam Pasal 2 nya, yakni asas: manfaat, kekeluargaan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian lingkungan, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, dan profesionalitas. AUPB ini diurai secara rinci dalam pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 3, 4, dan 6.
9	Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,;	Secara implisit menyiratkan implementasi asas: kepentingan umum, profesionalitas dan asas fasilitas khusus bagi kelompok rentan, dan asas keseimbangan dalam Pasal 3,5,6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24
10	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas kepentingan umum dan asas keprofesionalan dalam Pasal 3, 4, 14
11	Perwal Kota Yogyakarta	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB,

	No. 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogya No. 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;	namun secara implisit dan samar-samar telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
12	Perwal Kota Yogyakarta No 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit dan samar-samar telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas.
13	Perwal Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas.
14	Perawal Kota Yogyakarta No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
15	Perwal Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas.
16	Perwal Kota Yogyakarta No. 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan;	Secara eksplisit sudah merumuskan dan mengimplementasikan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dan diurai secara implisit dalam pasal-pasal lainnya.
17	Perwal Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
18	Perwal Kota Yogyakarta No. 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta;	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas dan asas kepentingan umum.
19	Perwal Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan implementasi asas profesionalitas, kepentingan umum, dan asas keadilan.

	Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008	
20	Perwal Kota Yogyakarta No 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit menyiratkan implementasi asas profesionalitas, kepentingan umum, dan asas ketertiban.

Sumber : Dokumen Hasil Penelitian Produk-Produk Hukum Daerah Kota Yogyakarta

3. Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo

Seperti halnya kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo juga dituangkan dalam berbagai produk hukum daerah yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai peraturan perundang-undangan pusat terkait dengan penanaman modal termasuk perizinan investasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Bupati Kulon Progo, maupun Surat Keputusan Bupati Kulon Progo dan produk-produk hukum daerah Kulon Progo lainnya.

Pada saat penelitian ini dilakukan peraturan perundang-undangan dari pusat terkait dengan perizinan investasi yang menjadi dasar dari implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo seperti halnya yang diacu oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. Sedangkan peraturan perundang-undangan pusat lainnya yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang

Penanaman Modal; dan berbagai Peraturan Kepala BKPM yang mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal termasuk perizinan investasi seperti: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Di samping itu implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.

Kebijakan pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo yang dituangkan dalam berbagai produk hukum daerah beberapa diantaranya sudah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam produk hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo dikemukakan beberapa contoh produk hukum kebijakan pelayanan perizinan investasi yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Bupati Kulon Progo dan produk hukum daerah Kulon Progo lainnya yang diambil secara acak. Kajian dan analisis dilakukan untuk melihat rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam produk hukum peraturan daerah Kulon Progo baik secara eksplisit maupun secara implisit dan uraian asas-asas tersebut ke dalam rumusan pasal-pasal produk-produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo. Namun demikian perlu diketahui bahwa produk-produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari segi kuantitas lebih sedikit bila dibandingkan dengan produk-produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Berikut ini dipaparkan hasil kajian dan analisis rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari produk-produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan kebijakan perizinan investasi di

Kabupaten Kulon Progo yang diambil secara acak. Beberapa contoh produk hukum yang dikaji dan dianalisis adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan;
- 3) Perda Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- 5) Perda Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
- 6) Perda Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya;
- 7) Perda Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 8) Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 9) Perbup Kulon Progo No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern;
- 10) S.K Bupati Kulon Progo No. 297 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Setelah dilakukan kajian dan analisis, terlihat bahwa dari produk-produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut ada yang sudah merumuskan dan mengimplementasikan secara eksplisit AUPB di dalamnya dan menguraikannya ke dalam pasal-pasal produk hukum daerah Kulon Progo, namun masih ada produk hukum daerah yang secara eksplisit tidak merumuskan AUPB di dalamnya melainkan baru merumuskannya secara implisit dan tersirat di dalam pasal produk-produk hukum daerah. Apabila kajian dan analisis produk-produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut dituangkan dalam bentuk tabel, akan terlihat sebagai berikut.

Tabel 4
Rumusan dan Implementasi AUPB Dalam Produk Hukum Daerah
Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Produk Hukum Daerah	Analisis dan Kajian Terhadap Rumusan dan Implementasi AUPB Pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Kulon Progo
1	Perda Kulon Progo No. 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah merumuskan implementasi asas kepentingan umum dan asas kelesarian fungsi lingkungan dalam ketentuan Pasal 2 dan dijabarkan lagi dalam Pasal 5, dan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban diuraikan dalam ketentuan Pasal 21, 22, dan 23.
2	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menguraikan implementasi asas kepentingan umum, asas partisipasi, dan asas kelesarian fungsi lingkungan dalam ketentuan bagian menimbang dan ketentuan Pasal 8, 13, dan Pasal 14
3	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menguraikan implementasi asas kepentingan umum dan asas partisipasi dalam ketentuan bagian menimbang dan ketentuan, serta asas fasilitas khusus bagi kelompok rentan terlihat dari ketentuan Pasal 19 ayat (2)
4	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas partisipatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban
5	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas kepentingan umum pada bagian menimbang
6	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya	Secara eksplisit tidak merumuskan AUPB, namun secara implisit telah menyiratkan rumusan implementasi asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum pada Pasal 2, asas keadilan pada Pasal 6
7	Perda Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Secara eksplisit telah merumuskan dan mengimplementasikan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam Pasal 2 dan belum dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal lainnya, namun sudah tersirat dalam uraian pasal-pasal lainnya
8	Perda No. 4 Tahun 2014 tentang	Secara eksplisit maupun implisit telah

	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	merumuskan AUPB. Secara implisit telah merumuskan implementasi asas pelestarian lingkungan pada bagian menimbang. Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit merumuskan tentang asas kemanfaatan, keadilan dan keseimbangan, partisipatif, transparans, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan asas ketertiban. Secara eksplisit AUPB juga dirumuskan dan diuraikan dalam pasal-pasal lain seperti Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 24 dan pasal-pasal lainnya.
9	Perbup Kulon Progo No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern	Secara eksplisit telah merumuskan dan mengimplementasikan AUPB, yaitu asas kepastian hukum dalam Pasal 2 ayat (1). Secara implisit telah merumuskan implementasi asas kepentingan umum, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas keadilan dan asas tertib penyelenggaraan negara seperti terlihat dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
10	S.K Bupati Kulon Progo No. 297 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	Secara eksplisit maupun implisit belum menyiratkan rumusan dan implementasi AUPB

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian Berbagai Produk Hukum Daerah Kabupaten Kulon Progo

Apabila dikaji dan dianalisis perbandingan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo didapatkan diskripsi hasil analisis dan kajian karakter produk-produk hukum kebijakan layanan publik perizinan investasi sebagaimana terlihat dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Karakteristik Rumusan dan Implementasi AUPB Pada Produk-Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perijinan Investasi Di DIY

No	Kabupaten/ Kota	Bentuk Produk Hukum Daerah	Karakter Rumusan dan Implementasi AUPB Pada Produk-Produk Hukum Kebijakan Layanan Publik Perijinan Investasi
1	Kabupaten Sleman	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati	Belum banyak dari produk-produk hukum daerah tersebut yang menguraikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) secara eksplisit, walaupun secara implisit dan samar-samar banyak yang sudah mengimplementasikan AUPB
2	Kota Yogyakarta	Peraturan Daerah & Peraturan Walikota	Secara eksplisit Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sudah banyak yang merumuskan dan menguraikan secara rinci implementasi AUPB, untuk Produk Hukum yang berupa Peraturan Daerah, sedangkan untuk Peraturan Walikota belum secara eksplisit menuangkan AUPB
3	Kabupaten Kulon Progo	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Produk Hukum Lainnya	Secara eksplisit dan implisit sudah banyak yang menguraikan AUPB pada produk-produk hukum daerah

Sumber: Berbagai Produk Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta

Setelah melihat uraian kajian dan analisis Implementasi AUPB dalam produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo seperti terlihat pada tabel 5 dapat dikemukakan bahwa karakter rumusan dan implementasi AUPB pada produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman belum banyak merumuskan dan menguraikan implementasi AUPB secara eksplisit dalam produk hukum yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun produk hukum yang berbentuk Surat Bupati. Sedangkan produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang berbentuk Peraturan Daerah sudah banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan AUPB secara terurai dan terinci dalam ketentuan pasal-pasal. Untuk produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo juga sudah banyak yang merumuskan dan menuangkan secara eksplisit dan terinci implementasi AUPB ke dalam pasal-pasal produk-produk hukum daerahnya.

Rumusan dan implementasi AUPB dalam produk-produk hukum daerah di Kabupaten/Kota yang ada di DIY ini juga berpengaruh terhadap implementasi AUPB dalam pelaksanaan kebijakan layanan perijinan investasi di lapangan. Namun demikian pelaksanaan kebijakan layanan perijinan investasi di lapangan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keuangan daerah, perkembangan wilayah dan juga faktor kemajuan pembangunan wilayah.

B. Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Pada Pelaksanaan Kebijakan Layanan Perizinan Investasi Di DIY

1. Implementasi AUPBDi Kabupaten Sleman

Pada saat penelitian ini dilakukan, pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan investasi di Kabupaten Sleman mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan. Khusus pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan perizinan investasi mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum dipakai sebagai acuan, mengingat undang-undang tersebut baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2014.

Peraturan perundang-undangan dari pusat terkait dengan perizinan investasi yang menjadi dasar dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. Sedangkan peraturan perundang-undangan pusat lainnya yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; dan berbagai Peraturan Kepala BKPM yang mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal termasuk perizinan investasi seperti: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

(Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Di samping itu implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.

Berikut ini dipaparkan hasil penelitian dan analisis implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman¹². Secara fisik terlihat bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang sekarang sudah berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah memberikan sarana/fasilitas bagi kelompok rentan dan defabel, walaupun apabila dibandingkan dengan bangunan fisik Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, sarana/fasilitas yang ada di Kabupaten Sleman belum sebagus dan sebaik yang ada di Kota Yogyakarta. Dari hasil pengamatan juga terlihat adanya petugas-pemandu layanan yang dengan ramah melayani pengguna layanan, ada layar sentuh walaupun seringkali tidak berfungsi untuk mendapatkan nomor antrian. Hal ini menunjukkan implemetasi dari **asas keadilan, asas kepentingan umum, asas kesamaan hak dan kewajiban seta asas profesionalitas**. Loker pelayanan perizinan dibuat rapi dan nyaman yang memperlihatkan telah dilaksanakannya keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh layanan, ruang tunggu yang cukup representatif yang berada di depan loket pelayanan. Pelaksanaan asas ini juga didukung oleh pernyataan dari pengguna layanan yang menyatakan bahwa para petugas di dalam melakukan pelayanan cukup hormat, santun dan ramah walaupun ada 2 orang pengguna layanan yang

¹²Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) dan pengambilan gambar-gambar di lokasi penelitian Kabupaten Sleman, serta melakukan wawancara dengan para pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman sejumlah 30 orang yang dipilih secara acak.

menyatakan masih ada petugas pelayanan yang kurang hormat, kurang santun dan kurang ramah.

Berdasarkan keterangan dari beberapa pengguna layanan di Kabupaten Sleman masih ada yang menyatakan bahwa pelaksanaan asas fasilitas khusus bagi kelompok rentan masih kurang baik. Dari hasil observasi juga terlihat secara fisik di ruangan pelayanan belum ada ruangan yang merupakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui seperti halnya di Kota Yogyakarta. Pernyataan dari pengguna layanan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6
Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan Di Kabupaten Sleman

No	Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Cukup mengindahkan kelompok rentan	9	30
2	Kurang mengindahkan kelompok rentan	21	70
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman juga menyediakan maklumat-maklumat yang berisi tentang petunjuk pelayanan, proses-proses untuk memperoleh layanan perizinan, dan maklumat-maklumat lain yang memperlihatkan adanya fasilitas-fasilitas untuk memperoleh kemudahan dan kejelasan dalam proses pelayanan, beserta fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana lainnya yang menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas profesionalitas telah dilaksanakan juga di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, walaupun pelaksanaan asas tersebut belum maksimal.

Berdasarkan pengamatan dari tim peneliti jumlah para pengguna/pemohon layanan perizinan di Kabupaten Sleman setiap harinya lebih banyak bila dibandingkan dengan pengguna layanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo¹³. Hal ini dapat dipahami karena jumlah jenis-jenis perizinan investasi yang ada di Kabupaten Sleman cukup banyak, yakni ada 77 jenis perizinan dan semuanya diajukan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yang sekarang sudah berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

¹³Berdasarkan keterangan dari Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Sleman rata-rata tiap hari lebih kurang seratus (100) orang minimal 60 orang. Keterangan diberikan pada tanggal 24 September 2013 Pada tahun 2015 Kantor ini sudah berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Sleman

Terpadu Kabupaten Sleman. Instansi ini yang bertindak selaku *front office*, penyelesaian perizinan masih dilakukan oleh instansi terkait.

Dari maklumat-maklumat pelayanan yang telah dipasang di papan pengumuman dan dinding Kantor layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman terlihat bahwa asas keterbukaan dari sisi kejelasan prosedur pengurusan perizinan investasi sudah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para pengguna layanan yang dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 7
Pelaksanaan Asas Keterbukaan Di Kabupaten Sleman Dari Sisi Kejelasan
Prosedur Pengurusan Perizinan

No	Transparansi dan Kejelasan Prosedur Perizinan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat jelas dan transparan	2	6,66
2	Cukup jelas dan transparan	21	70
3	Kurang jelas dan kurang transparan	6	20
4	Tidak jelas dan tidak transparan	1	3,33
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Walaupun pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan perizinan investasi belum sebaik Kota Yogyakarta, **asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas kepentingan umum, asas kemudahan serta keterjangkauan** serta asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik telah dilaksanakan dalam layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengambil foto-foto kegiatan pelayanan perizinan investasi di lapangan.

Pelaksanaan asas kepastian hukum, ketepatan waktu, keterbukaan & profesionalitas dalam proses perizinan dapat dilihat dalam tabel berikut yang menggambarkan bahwa pelaksanaan asas-asas tersebut di Kabupaten Sleman masih belum baik. Hal ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sleman masih belum melaksanakan pelayanan perizinan satu pintu, sehingga proses penyelesaian izin investasi masih berada pada instansi sektoral dan seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan proses perizinan investasi. Pernyataan dari pengguna layanan perizinan di Kabupaten Sleman mengenai kesesuaian waktu yang diumumkan dengan penyelesaian proses perizinan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 8
Kesesuaian Waktu Yang Diumumkan Dengan Penyelesaian Proses Perizinan Di Kabupaten Sleman

No	Kesesuaian Waktu yg Diumumkan dalam Pengurusan Izin Investasi	Jumlah	Prosentase(%)
1	Sangat sesuai	2	6,66
2	Cukup sesuai	9	30
3	Kurang sesuai	19	63,33
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Akibat dari pelaksanaan layanan perizinan investasi yang belum menerapkan pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) yang terkadang memerlukan waktu yang lama maka ada di antara pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa prosedur pengurusan izin investasi di Kabupaten Sleman cukup berbelit-belit dan kurang sederhana. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 9
Kesederhanaan Prosedure Pengurusan Izin Investasi Di Kabupaten Sleman

No	Kesederhanaan prosedure pengurusan izin investasi	Jumlah	Prosedure (%)
1	Sangat sederhana	1	3,33
2	Cukup sederhana	22	73,33
3	Kurang sederhana (berbelit-belit)	7	23,33
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Kenyataan yang menunjukan bahwa pengurusan izin investasi di Kabupaten Sleman masih berbelit-belit juga didukung oleh pernyataan pengguna layanan perizinan investasi pada tabel 10. Hal ini terkait juga dengan pelaksanaan asas keterbukaan, asas partisipatif, asas keseimbangan hak & kewajiban.

Tabel 10
Kemudahan Akses Informasi yang Dibutuhkan Di Kabupaten Sleman

No	Kemudahan Akses Informasi Yang Dibutuhkan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat mudah untuk dipahami	3	10
2	Cukup mudah untuk dipahami	18	60
3	Kurang mudah untuk dipahami	9	30
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Tabel nomor 10 menunjukkan bahwa ada 30 % dari pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa akses informasi yang dibutuhkan kurang mudah untuk dipahami. Hal ini kemungkinan besar terkait

dengan belum dilaksanakannya pelayanan perizinan satu pintu yang mengakibatkan seringkali tidak jelasnya poses penyelesaian izin investasi di Kabupaten Sleman. Selain itu kemungkinan juga disebabkan karena belum dirumuskannya secara eksplisit dan terinci AUPB dalam produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman.

2. Implementasi AUPBDi Kota Yogyakarta

Kebijakan pelayanan publik bidang perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai peraturan perundang-undangan pusat terkait dengan penanaman modal termasuk perizinan investasi dari pusat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai pengaturan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam berbagai bentuk produk hukum daerah kota Yogyakarta, seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta maupun Peraturan Wali Kota Yogyakarta dan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta. Berdasarkan hasil kajian dan analisis rumusan dan implementasi AUPB pada produk-produk hukum daerah Kota Yogyakarta, rumusan dan implementasi AUPB dalam produk-produk hukum daerah Kota Yogyakarta lebih baik apabila dibandingkan dengan rumusan dan implementasi AUPB dalam produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman hal ini juga mempengaruhi implementasi AUPB dalam pelaksanaan kebijakan layanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta.

Pada saat penelitian ini dilakukan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang terkait dengan kebijakan perizinan investasi yang menjadi dasar dari implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPUB) dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. Sedangkan peraturan perundang-undangan pusat lainnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka

Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; dan berbagai Peraturan Kepala BKPM yang mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal termasuk perizinan investasi seperti: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Di samping itu implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.

Terkait dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam perizinan investasi di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Propinsi DIY hanya bertindak sebagai lembaga koordinasi, tidak berhak membuat kebijakan dan pengaturan terhadap kebijakan perizinan investasi di Kota Yogyakarta. Hal ini terkait dengan kebijakan pengaturan tentang kewenangan pemerintah (pusat), pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas menghendaki bahwa kepada daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (pusat). Prinsip nyata dan bertanggung jawab menghendaki bahwa daerah dalam melaksanakan otonominya untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan ketentuan pasal 14 UU Nomor 32

Tahun 2004 bahwa pelayanan administrasi penanaman modal (termasuk di dalamnya perizinan investasi) dalam lingkup kabupaten/kota adalah urusan wajib yang menjadi kewenangannya. Saat penelitian dilakukan dan akan diakhiri keluarlah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004. Substansi kedua Undang-undang ini memang berbeda terutama pada bagian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, namun pada saat penelitian ini dilakukan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan investasi masih mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004.

Kebijakan administrasi penanaman modal termasuk di dalamnya perizinan investasi di kabupaten/kota di Indonesia mendasarkan diri pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Kota Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia di dalam melaksanakan otonomi daerahnya mengacu pada kebijakan-kebijakan yang diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagaimana telah dijelaskan di muka. Kebijakan pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta sudah memperlihatkan implementasi terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan cukup baik. Beberapa contoh kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sudah memperlihatkan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait dengan pelayanan perizinan investasi.

Setelah didapatkan data lapangan baik berdasarkan dokumentasi, wawancara, serta observasi dapat dikemukakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik sudah dilaksanakan, baik itu asas **kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan**, sudah dilaksanakan dengan cukup baik¹⁴.

¹⁴Dari data dokumentasi didapatkan sebuah Laporan Penelitian Doing Bisnis di Indonesia tahun 2012 yang dikeluarkan oleh *Advisory Services International Finance Corporation (IFC) Indonesia* dan *Global Indicators and Analysis Department* dari Group Bank Dunia bekerjasama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2012: hal 2) yang melaporkan bahwa di seluruh Indonesia, posisi kota dengan proses termudah untuk mendirikan usaha diduduki oleh Yogyakarta, untuk mengurus izin-izin mendirikan bangunan diduduki oleh Balikpapan, dan untuk mendaftarkan properti diduduki oleh Bandung dan Jakarta. Laporan ini mendukung hasil penelitian di lapangan tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan layanan perizinan di Kota Yogyakarta.

Kajian tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan layanan perizinan investasi Di Kota Yogyakarta dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada layanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan melihat apakah pelaksanaan layanan tersebut sudah mengindahkan asas-asas pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pelayanan Publik. Asas-asas tersebut yakni asas: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan ketepatan, kemudahan serta keterjangkauan.

Analisis mengenai telah diimplementasikannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dengan cukup baik di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari pernyataan 30 pengguna layanan perijinan investasi yang sedang mengurus perizinan investasi Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta¹⁵. Para pengguna layanan perizinan investasi yang diwawancarai menyatakan bahwa pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik perizinan investasi di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan cukup baik, bahkan beberapa pengguna layanan menyatakan sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dan hanya ada satu pengguna layanan yang menyatakan bahwa pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik masih kurang baik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada para pengguna layanan (subjek penelitian) terkait dengan bagaimana para petugas di dalam melayani pemohon; apakah pemohon sudah mendapatkan keadilan dalam pelayanan termasuk; adakah diskriminasi dalam pelayanan; apakah petugas pelayanan sudah melakukan tugasnya secara profesional, hormat, ramah dan sopan; apakah prosedur perizinan diumumkan secara jelas dan transparan termasuk untuk biaya-biaya yang diperlukan; apakah prosedur yang dimaklumkan mudah untuk difahami; apakah persyaratan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan; adakah fasilitas-fasilitas dan sarana khusus bagi kelompok rentan misalnya untuk orang tua dan defabel; apakah besarnya biaya yang diperlukan sebanding dengan hasil yang diperoleh; adakah kesesuaian waktu dengan selesainya

¹⁵Seperti halnya penelitian di Kabupaten Sleman pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai 30 pengguna layanan yang dipilih secara acak dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat semi tertutup.

pengurusan perizinan; bagaimanakah kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan; bagaimanakah kecepatan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan; bagaimanakah keamanan lingkungan dalam pengurusan perizinan; apakah sarana dan prasarana pelayanan bersih, rapi, teratur sehingga memberikan rasa nyaman.

Pernyataan pengguna layanan perizinan mengenai sudah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pelayanan Publik tersebut juga didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa setiap dua (2) bulan sekali dilakukan *in house training* bagi para petugas terkait dengan kegiatan pelayanan perizinan. Juga terlihat dari hasil pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang setiap bulan dianalisis dan ditindaklanjuti oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata terakhir pada tahun 2013 yang dianalisis sampai dengan bulan Juni 2013 memperlihatkan bahwa untuk perizinan yang terkait dengan kegiatan investasi, yakni Izin Membangun Bangun Bangunan: 80, 33; Izin Gangguan: 81, 86; Surat Izin Usaha Perdagangan: 81, 48; Tanda daftar Perusahaan: 82,55; Tanda Daftar Usaha Pariwisata: 84, 52; jenis izin lainnya: 84, 54.

Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipakai sebagai dasar pengukuran kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan investasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta berbentuk kuesioner yang diedarkan pada setiap pengguna layanan yang kemudian diisi oleh pengguna layanan pada saat mereka selesai melakukan proses permohonan perizinan yang berisi pertanyaan terkait dengan pelayanan perizinan yang mereka peroleh dari para petugas layanan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengacu pada ke 14 butir indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi negara atau birokrat yang termuat di dalam Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 dan Lampiran Perka BKPM No.11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yakni terkait dengan:

1. Prosedure pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kemudahan alur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan, yakni persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepatian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya;
4. Kedisiplinan pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas dalam pelayanan, yakni tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan dalam mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan;
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Dari penilaian IKM yang dilakukan oleh pengguna layanan yang dengan menggunakan standar Lampiran Perka BKPM No.11 Tahun 2009 dengan penilaian rata-rata lebih dari 81 tersebut di atas, setelah dilakukan kajian dan analisis dengan menggunakan kriteria asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimuat dalam ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik yang hampir sama dengan ketentuan Lampiran Perka BKPM No.11 Tahun 2009 dan juga mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melaksanakan asas-asas

umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan layanan publik bidang perizinan investasi.

Dari data dokumentasi, wawancara dan observasi terlihat bahwa proses dan prosedur pengurusan perizinan investasi di Kota Yogyakarta cukup mudah dan tidak berbelit-belit, tidak memerlukan waktu yang cukup lama, hampir semua jenis perizinan tidak memerlukan biaya karena tidak ditarik retribusi. Hal ini memperlihatkan telah dilaksanakannya asas **keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan.**

Transparansi mengenai biaya dalam pengurusan perizinan juga telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta, pengurusan izin investasi tidak dikenai biaya, kecuali beberapa izin, antara lain IMB dan Izin Gangguan (alasan: karena untuk pemberian izin ini, petugas memerlukan survey ke lokasi sehingga perlu dana transportasi). Hal ini dapat dilihat dari maklumat pelayanan yang terpasang di ruangan pelayanan perizinan. Hal ini menunjukkan telah dilaksanakannya asas transparansi. Tentang besarnya retribusi, diatur dalam Perda yang dipublikasikan dalam maklumat yang ada di dekat pintu masuk ruang pelayanan. Pemungutan biaya retribusi untuk izin-izin tertentu juga diumumkan, termasuk juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi beserta Perda-perda Kota Yogyakarta yang mengaturnya. Di antaranya untuk proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peraturan perundang-undangan yang mengatur :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berikut ini contoh diskripsi tentang pelaksanaan asas tranparansi dalam proses perizinan IMB yang juga dijelaskan subjek (orang yang dikenai) kewajiban untuk mengurus IMB, yakni setiap orang atau badan yang akan membangun bangunan baru, mengubah, memperluas mengurangi dan merawat bangunan gedung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Orang yang melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kegiatan mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan untuk memperoleh IMB ada 2 syarat, yakni: syarat administrasi dan syarat teknis. Syarat administrasi, antara lain:

- a. Mengisi secara lengkap formulir permohonan IMB, tanda tangan pemohon, diketahui oleh tetangga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat
- b. Fotocopy KTP pemohon
- c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah
- d. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan IMB tidak dalam sengketa.

Waktu proses pengurusan IMB selambat-lambatnya tujuh belas (17) hari kerja terhitung sejak didaftarnya permohonan IMB apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar. Besarnya biaya retribusi juga ditentukan di dalam maklumat pelayanan.

Bukti lain dari telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta, yakni dari hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan terlihat bahwa di Kantor Dinas tersebut telah tersedia fasilitas dan sarana-sarana bagi kelompok rentan dan defabel, adanya petugas-petugas pemandu layanan yang dengan ramah melayani pengguna layanan, layar sentuh untuk mendapatkan nomor antrian yang menunjukkan implemetasi dari asas keadilan, pembagian loket-loket pelayanan perizinan yang dibuat kelompok-kelompok untuk jenis perizinan tertentu yang memperlihatkan telah dilaksanakannya keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh layanan, loket pengaduan, loket pengambilan izin yang sudah jadi dalam bentuk Surat Keputusan Izin, loket petugas penghubung, ruang tunggu yang cukup representatif dan nyaman yang berada di sekitar loket-loket pelayanan, ruangan khusus untuk ibu menyusui, Kantor Bank yang berada di Dinas Perizinan yang bisa diakses oleh pengguna layanan apabila mereka harus membayar biaya retribusi dan biaya pelayanan. Di samping itu juga

terdapat maklumat-maklumat yang berisi tentang petunjuk pelayanan, proses-proses untuk memperoleh layanan perizinan, dan maklumat-maklumat lain yang memperlihatkan adanya fasilitas-fasilitas untuk memperoleh kemudahan dan kejelasan dalam proses pelayanan, beserta fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana lainnya yang menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kebijakan pelayanan publik dibidang perizinan investasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa gambar/foto-foto yang memperlihatkan telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kebijakan pelayanan publik dibidang perizinan investasi. Bukti-bukti tersebut memperlihatkan telah dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pelaksanaan perizinan investasi di Kota Yogyakarta.

Berikut ini dipaparkan hasil penelitian¹⁶ yang memperlihatkan pernyataan para pengguna layanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta yang berusia antara 25 sampai 55 tahun dengan strata tingkat pendidikan sebagian besar adalah S1 (strata 1) terhadap pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada layanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta. Dipaparkan juga hasil observasi mengenai keadaan lingkungan fisik ruangan pelayanan perizinan investasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian di dapatkan data bahwa jenis perizinan yang sedang dimintakan proses untuk memperoleh perizinan investasi atau jenis perizinan yang di mohon, yaitu: HO, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Para pengguna layanan perijinan yang diwawancarai menyatakan bahwa perlakuan petugas dalam melayani pengguna layanan perizinan semuanya menyatakan bahwa para petugas melayani dengan cukup baik dan sudah memperlakukan dengan cukup adil, walaupun ada dua (2) pengguna layanan yang menyatakan ada petugas yang bertindak kurang adil dalam melakukan pelayanan dan kurang mengindahkan asas kepentingan umum. Pernyataan pengguna layanan ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

¹⁶Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai pengguna layanan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa angket semi tertutup sejumlah 30 orang yang dilakukan secara acak

Tabel 11
Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum dan Asas Keadilan Oleh Petugas
Pelayanan Di Kota Yogyakarta

No	Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum dan Asas Keadilan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat mengindahkan	8	26,66
2	Cukup mengindahkan	20	66,66
3	Kurang mengindahkan	2	6,66
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Tabel 11 memperlihatkan pernyataan dari para pengguna layanan perizinan Kota Yogyakarta yang sebagian besar (66,66%) menyatakan bahwa petugas pelayanan perizinan sudah cukup mengindahkan asas kepentingan umum dan asas keadilan, bahkan 8 orang (26,66%) di antaranya menyatakan para petugas pelayanan perizinan sangat mengindahkan pelaksanaan asas kepentingan umum dan asas keadilan. Namun demikian ada 2 (6,66%) pengguna layanan perizinan yang menyatakan bahwa petugas pelayanan kurang mengindahkan pelaksanaan asas kepentingan umum dan asas keadilan.

Di antara ke tiga puluh (30) pengguna layanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta tersebut, 10 orang (33,33%) menyatakan bahwa petugas pelayanan perizinan telah melaksanakan tugasnya dengan sangat profesional, dan ada 17 orang (56,66%) yang menyatakan bahwa para petugas layanan perizinan cukup profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian ada 3 orang (10%) yang menyatakan bahwa ada petugas pelayanan yang menjalankan tugasnya kurang profesional. Untuk melihat secara lebih jelas pernyataan pengguna layanan perizinan tersebut dapat dilihat dalam tabel 12

Tabel 12
Pelaksanaan Asas Profesionalitas Oleh Petugas Pelayanan
Di Kota Yogyakarta

No	Pelaksanaan Asas Profesionalitas	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat profesional	10	33,33
2	Cukup profesional	17	56,66
3	Kurang profesional	3	10
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Para pengguna layanan menyatakan juga bahwa petugas di dalam melaksanakan tugasnya bersikap hormat, santun dan ramah. Dari sisi kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan sebagian besar 19 orang (63,33%) subjek penelitian menyatakan sudah cukup disiplin dan sebagian pengguna lainnya 10 orang (33,33%) menyatakan sangat disiplin.

Mengenai pelaksanaan asas keterbukaan dari sisi kejelasan prosedur pengurusan perizinan sebagian besar pengguna layanan yang diwawancarai menyatakan bahwa prosedur pengurusan perizinan investasi cukup jelas dan transparan. Namun demikian masih ada juga pengguna layanan yang menyatakan bahwa prosedur pengurusan perizinan investasi masih kurang jelas dan transparan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 13.

Tabel 13
Pelaksanaan Asas Keterbukaan Di Kota Yogyakarta Dari Sisi
Kejelasan Prosedur Pengurusan Perizinan

No	Transparansi dan Kejelasan Prosedur Perizinan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat jelas dan transparan	11	36,66
2	Cukup jelas dan transparan	16	53,33
3	Kurang jelas dan transparan	3	10
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Mengenai transparansi biaya pelayanan perizinan investasi, mereka mengatakan sudah cukup transparan bahkan ada pengguna layanan yang menyatakan bahwa dari sisi biaya sudah diumumkan secara sangat transparan. Memang dalam maklumat pelayanan perizinan sudah dimuat tentang biaya pelayanan dan banyak di antara jenis-jenis layanan perizinan yang tidak dipungut biaya dalam proses perolehan perizinan investasi.

Untuk pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan para pengguna layanan sebagian besar menyatakan bahwa asas ini sudah diindahkan dalam layanan perizinan di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 14
Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan Di Kota Yogyakarta

No	Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat mengindahkan kelompok rentan	3	10
2	Cukup mengindahkan kelompok rentan	26	86,66
3	Kurang mengindahkan kelompok rentan	1	3,33
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Pernyataan pengguna layanan perizinan investasi ini juga didukung dengan data observasi di lapangan yang memperlihatkan bahwa ruangan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan kaum defabel dan kelompok rentan dalam memasuki ruangan perizinan dan juga disediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui.

Mengenai kemudahan akses informasi yang dibutuhkan yang juga merupakan pelaksanaan dari asas keterbukaan, asas partisipatif, asas keseimbangan hak & kewajiban sebagian besar pengguna layanan yakni 18 orang (60%) menyatakan bahwa akses informasi yang dibutuhkan cukup mudah untuk didapatkan, 10 orang (33,33%) mengatakan akses terhadap informasi yang dibutuhkan sangat mudah. Pernyataan pengguna layanan ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 15
Kemudahan Akses Informasi yang Dibutuhkan Dalam Layanan Perizinan Di Kota Yogyakarta

No	Kemudahan Terhadap Akses Informasi Yang Dibutuhkan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat mudah	10	33,33
2	Cukup mudah	18	60
3	Kurang mudah	2	6,66
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Mengenai tanggapan petugas terhadap pengaduan dari pengguna layanan perijinan investasi di Kota Yogyakarta yang merupakan pelaksanaan dari asas profesionalitas, asas partisipatif, dan asas kepentingan umum dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 16
Tanggapan Petugas Terhadap Pengaduan dari Pengguna Layanan
Perizinan Investasi Di Kota Yogyakarta

No	Tanggapan Terhadap Pengaduan dari Pengguna Layanan Perizinan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat ditanggapi dengan baik	8	26,66
2	Cukup ditanggapi dengan baik	20	66,66
3	Kurang ditanggapi dengan baik	2	6,66
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Tabel 16 memaparkan tentang pernyataan pengguna layanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta mengenai tanggapan petugas pelayanan terhadap keluhan-keluhan pengguna layanan perizinan. Dari paparan tabel tersebut terlihat bahwa tanggapan petugas layanan terhadap keluhan pengguna layanan ditanggapi dengan sangat baik dan cukup baik.

Setelah melihat uraian analisis implementasi AUPB pada pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di Kota Yogyakarta dan dibandingkan dengan uraian analisis implementasi AUPB pada pelaksanaan kebijakan layanan perizinan di Kabupaten Sleman, maka dapat dinyatakan bahwa imlementasi AUPB dalam pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di Kota Yogyakarta lebih baik apabila dibandingkan dengan implementasi AUPB pada pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di Kabupaen Sleman. Hal ini juga dipengaruhi oleh telah dirumuskannya dan diimplementasikannya dengan baik AUPB dalam produk-produk hukum daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten Sleman tidak banyak AUPB yang telah dirumuskan secara eksplisit maupun implisit di dalamnya, sehingga walaupun di Kabupaten Sleman AUPB sudah dilaksanakan dalam layanan perizinan investasi, namun apabila diperhatikan di dalam pelaksanaan layanan perizinan Kota Yogyakarta lebih baik.

3. Implementasi AUPBDi Kabupaten Kulon Progo

Kajian dan analisis tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan menganalisis pelaksanaanasas-asas umum pemerintahan yang baik pada layanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dengan melihat apakah pelaksanaan layanan

tersebut sudah mengindahkan asas-asas pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pelayanan Publik seperti halnya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pelaksanaan layanan perizinan investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo berbeda dengan pelaksanaan layanan perizinan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Investasi di daerah ini belum berkembang pesat seperti di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Namun demikian investasi di Kulon Progo berpotensi untuk berkembang seperti halnya wilayah-wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan di wilayah ini direncanakan akan didirikan Bandara internasional untuk wilayah DIY dan sekitarnya. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan jumlah para pengguna/pemohon layanan perizinan di Kabupaten Kulon Progo setiap harinya lebih sedikit bila dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yang pada saat penelitian ini dilakukan bertindak selaku *front office* seperti halnya layanan perizinan investasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti halnya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan perizinan investasi mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan belum mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengingat undang-undang tersebut baru dikeluarkan pada bulan Oktober 2014.

Peraturan perundang-undangan dari pusat terkait dengan perizinan investasi yang menjadi dasar dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo seperti halnya peraturan yang berlaku di Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. Sedangkan peraturan perundang-undangan pusat lainnya yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; dan berbagai Peraturan Kepala BKPM yang mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal termasuk perizinan investasi seperti: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Di samping itu implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.

Berikut ini dipaparkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai pejabat di lingkungan badan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan pengguna layanan perizinan di Kabupaten Kulon Progo. Dipaparkan juga hasil observasi mengenai keadaan lingkungan fisik ruangan pelayanan perizinan investasi di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Sebagaimana pelaksanaan penelitian di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, subjek penelitian yang diwawancarai adalah 30 pengguna layanan perizinan yang dipilih secara acak. Rentangan usia subjek penelitian antara 26 sampai dengan 55 tahun. Sedangkan tingkat pendidikan subjek penelitian SMP/ sederajat 2 orang, SMA/ sederajat 14 orang, D3 1 orang, S 12 orang, dan S2 1 orang. Adapun jenis perizinan investasi yang dimohon oleh para pengguna layanan perizinan adalah

HO, IMB, TDP, Izin Reklame, SIUP dan perizinan investasi lainnya seperti Izin usaha jasa Konstruksi, IPDR, dan IUTM.

Mengenai pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perizinan investasi, para pengguna layanan perizinan investasi di Kabupten Kulon Progo menyatakan bahwa asas-asas tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini juga senada dengan pernyataan dari Kepala Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan layanan perizinan para pelaksana di lapangan sudah mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di dalam pembuatan produk-produk hukum daerah terkait dengan kebijakan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo juga sudah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam berbagai produk hukum daerah. Mengenai implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam layanan perijinan investasi di kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari paparan tabel berikut ini.

Tabel 17
Keadilan Petugas Dalam Melakukan Pelayanan
Di Kabupaten Kulon Progo

No	Keadilan Dalam Melakukan Pelayanan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat adil	7	23,33
2	Cukup adil	22	73,33
3	Kurang adil	1	3,33
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Setelah dikaji dan dianalisis dari tabel 17 terlihat bahwa asas keadilan sudah diimplemtasikan dalam kebijakan layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini terlihat dari 22 orang (73,33%) pengguna layanan perizinan investasi menyatakan bahwa para petugas dalam melakukan pelayanan sudah memperlakukan pengguna layanan dengan cukup adil, bahkan ada 7 orang (23,33%) pengguna layanan perizinan yang menyatakan para petugas dalam melakukan pelayanan memperlakukannya dengan sangat adil. Namun demikian ada 1 orang (3,33%) yang menyatakan bahwa petugas pelayanan memperlakukan pengguna layanan secara kurang adil.

Sedangkan tabel 18 memperlihatkan sudah dilaksanakannya asas kepentingan umum dalam layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 18
Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum Oleh Petugas Pelayanan
Di Kabupaten Kulon Progo

No	Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat mengindahkan	8	26,66
2	Cukup mengindahkan	17	56,66
3	Kurang mengindahkan	1	3,33
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Setelah dikaji dan dianalisis, dari tabel 18 dapat dikemukakan bahwa asas kepentingan umum juga sudah dilaksanakan dengan baik di dalam layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini terlihat dari pernyataan pengguna layanan yang sebagian besar (56,66%) menyatakan bahwa petugas pelayanan perizinan investasi sudah cukup mengindahkan asas kepentingan umum. Bahkan ada 8 orang (26,66%) yang menyatakan bahwa petugas pelayanan perizinan sangat mengindahkan asas kepentingan umum. Namun demikian ada 1 orang pengguna layanan perizinan yang menyatakan bahwa petugas kurang mengindahkan kepentingan umum.

Pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo juga menyatakan bahwa asas profesionalitas telah dilaksanakan. Hal ini dapat dianalisis dari pernyataan mereka yang mengemukakan bahwa para petugas dalam melaksanakan tugasnya melakukannya dengan profesional. Namun demikian ada dua (2) pengguna layanan perizinan yang menyatakan bahwa petugas dalam melayani pengguna layanan perizinan bertindak secara kurang profesional. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 19.

Tabel 19
Pelaksanaan Asas Profesionalitas Di Kabupaten Kulon Progo

No	Pelaksanaan Asas Profesionalitas	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat profesional	9	30
2	Cukup profesional	19	63,33
3	Kurang profesional	2	6,66
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Mengenai pelaksanaan asas profesionalitas, pengguna layanan perizinan di Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa para petugas layanan perizinan bersikap hormat dan santun serta ramah terhadap pengguna layanan perizinan.

Asas keterbukaan juga sudah dilaksanakan dalam layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dapat dikaji dan dianalisis dari paparan tabel 20 yang memaparkan tentang transparansi dan kejelasan prosedur perizinan, walaupun berdasarkan hasil observasi maklumat pelayanan yang dipasang di instansi layanan perizinan Kabupaten Kulon Progo tidak sebaik yang dipasang di Kantor pelayanan perizinan investasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Di Kota Yogyakarta alur pelayanan dipasang dengan jelas dalam papan pengumuman, demikian juga di Kabupaten Sleman.

Tabel 20
Pelaksanaan Asas Keterbukaan Di Kabupaten Kulon Progo

No	Transparansi & kejelasan Prosedure Perijinan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat jelas dan transparan	9	30
2	Cukup jelas dan Transparan	20	66,66
3	Tidak jelas dan tidak transparan	1	3,33
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Mengenai kesederhanaan prosedur yang diumumkan para pengguna layanan perizinan 12 orang (40%) menyatakan sangat sederhana, 13 orang (43,33%) menyatakan cukup sederhana. Sedangkan 5 orang (16,66%) menyatakan kurang sederhana atau cukup berbelit-belit. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 21
Kesederhanaan Prosedure Perizinan Investasi Di Kabupaten Kulon Progo

No	Kesederhanaan prosedure pengurusan izin investasi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat sederhana	12	40
2	Cukup sederhana	13	43,33
3	Kurang sederhana (cukup berbelit-belit)	5	16,66
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Pelaksanaan asas keterbukaan dari sisi transparansi biaya pengurusan izin investasi sudah diumumkan secara transparan, bahkan kebanyakan proses pengurusan perizinan investasi di Kabupaten Kulo Progo tidak dipungut biaya. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor BPMPT Kabupaten Kulon Progo, proses perizinan investasi tidak dipungut biaya kecuali pengurusan izin-izin tertentu seperti IMB namun demikian disinyalir pengurusan administrasi di Kantor Desa dan bahkan mulai dari Dusun ada pungutan biaya. Hal ini seperti halnya di Kota Yogyakarta

bahwa bahwa hampir semua jenis perizinan investasi berdasarkan maklumat yang diumumkan pada para pengguna layanan perizinan tidak memerlukan biaya karena tidak ditarik retribusi, kecuali jenis perizinan tertentu.

Sedangkan pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan berdasarkan hasil pengamatan, terutama akses pintu masuk di kantor pelayanan perizinan di Kabupaten Kulon Progo pada saat penelitian dilakukan masih kurang mengindahkan kelompok rentan terutama kaum defabel dan ibu menyusui karena belum disediakan tempat khusus. Hal ini kemungkinan disebabkan karena investasi di Kabupaten Kulon Progo belum berkembang pesat seperti di kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengguna layanan perizinan di Kabupaten Kulon Progo yang mengurus perizinan investasi apabila diamati jumlahnya masih sedikit bila dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pernyataan pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo 9 orang (30%) di antaranya mengemukakan bahwa pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan masih kurang diindahkan. Ada tiga (3) orang yang menyatakan bahwa pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan sangat diindahkan, dan ada delapan (18) belas pengguna layanan perizinan investasi yang menyatakan bahwa pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan cukup diindahkan. Hal dapat dilihat dalam tabel 22.

Tabel 22
Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan
Di Kabupaten Kulon Progo

No	Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat mengindahkan kelompok rentan	3	10
2	Cukup mengindahkan kelompok rentan	18	60
3	Kurang mengindahkan kelompok rentan	9	30
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Pernyataan dari para pengguna layanan perizinan investasi di Kulon Progo mengenai kenyamanan lingkungan tempat pelayanan dari segi kebersihan, kerapihan dan keteraturan tempat pelayanan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 23
Kenyamanan Lingkungan Fisik dari Segi Kebersihan, Kerapihan dan
Keteraturan Tempat Pelayanan Di Kabupaten Kulon Progo

No	Kenyamanan Lingkungan Tempat Pelayanan dari sisi Kebersihan, Kerapihan & Keteraturan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat nyaman	9	30
2	Cukup nyaman	16	53,33
3	Kurang nyaman	5	16,66
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Setelah dikaji dan dianalisis dari paparan tabel 23 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar atau 16 orang (53,33%) pengguna layanan perizinan menyatakan bahwa lingkungan fisik tempat pelayanan cukup nyaman, bersih, rapi dan teratur, 9 orang (30%) menyatakan sangat nyaman, walaupun tidak sebgus Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Namun demikian ada 5 orang (16,66%) pengguna layanan perizinan investasi yang mengemukakan lingkungan fisik tempat pelayanan kurang nyaman, dari sisi kebersihan, kerapihan dan keteraturan tempat pelayanan.

Mengenai tanggapan petugas terhadap pengaduan dari pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan pelaksanaan dari asas profesionalitas, asas partisipatif, dan asas kepentingan umum dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 24
Tanggapan Petugas Terhadap Pengaduan dari Pengguna Layanan Perizinan
Investasi Di Kabupaten Kulon Progo

No	Tanggapan Terhadap Pengaduan dari Pengguna Layanan Perijinan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sangat ditanggapi dengan baik	7	23,33
2	Cukup ditanggapi dengan baik	21	70
3	Kurang ditanggapi dengan baik	2	6,66
	Jumlah	30	100

Sumber: Dokumen Hasil Penelitian

Tabel 24 memaparkan tentang pernyataan pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo mengenai tanggapan petugas pelayanan terhadap keluhan-keluhan pengguna layanan perizinan. Dari paparan tabel tersebut terlihat bahwa tanggapan petugas layanan terhadap keluhan pengguna layanan ditanggapi dengan sangat baik dan cukup baik. Namun demikian masih ada pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo yang menyatakan

bahwa keluhan-keluhan pengguna layanan perizinan kurang ditanggapi oleh petugas pelayanan.

Setelah melihat uraian kajian dan analisis implementasi AUPB di Kabupaten Kulon Progo apabila dibandingkan dengan pelaksanaan AUPB di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, dapat dikemukakan bahwa implementasi AUPB dalam pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo memang belum sebaik implementasi AUPB di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, terutama dari sisi lingkungan fisik tempat pelayanan yang mencerminkan asas kepentingan umum dan belum terlihat pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan secara maksimal, namun perlu disadari memang perkembangan wilayah dan pembangunan wilayah di Kabupaten Kulon Progo memang belum sepesat perkembangan wilayah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melihat paparan uraian kajian dan analisis pada bab-bab terdahulu dalam penelitian yang merupakan bagian dari desertasi ini, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Pertama, perumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada produk-produk hukum pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Secara eksplisit tidak banyak produk hukum daerah Kabupaten Sleman yang merumuskan dan mengimplementasikan AUPB, baik itu produk hukum yang berupa peraturan daerah, peraturan bupati, maupun surat keputusan bupati. Namun secara implisit sudah ada produk hukum yang merumuskan dan mengimplementasikan AUPB, walaupun masih ada yang dirumuskan secara samar dan sumir;

2. Produk Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta

Secara eksplisit maupun implisit sudah banyak produk hukum daerah Kota Yogyakarta yang merumuskan dan mengimplementasikan AUPB, terutama produk hukum yang berupa peraturan daerah Kota Yogyakarta. Namun demikian masih ada produk hukum yang berupa peraturan Walikota Yogyakarta yang masih secara implisit dan samar-samar dalam merumuskan dan mengimplementasikan AUPB;

3. Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Secara eksplisit maupun implisit sudah banyak produk hukum daerah Kabupaten Kulon Progo yang merumuskan dan mengimplementasikan AUPB serta diuraikan pada ketentuan pasal-pasal di dalamnya. Namun demikian masih ada produk hukum yang berupa Surat Keputusan Bupati Kulon Progo yang secara eksplisit maupun implisit belum mengimplementasikan AUPB di dalamnya.

Kedua, implementasi AUPB dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di Kabupaten Sleman sudah cukup baik, beberapa asas sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih asas-asas umum pemerintahan yang belum dilaksanakan dengan baik. Implementasi AUPB di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik, bahkan dari ke tiga (3) wilayah yang diteliti Kota Yogyakarta paling baik di dalam mengimplementasikan AUPB dalam pelaksanaan

kebijakan pelayanan publik perizinan investasi. Implementasi AUPB di Kabupaten Kulon Progo juga sudah cukup baik walaupun belum sebaik di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan temuan-temuan dalam penelitian di lapangan maka dikemukakan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota lainnya Di Indonesia

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia lainnya, seyogyanya di dalam menyusun produk-produk hukum di daerah termasuk produk hukum yang menjadi dasar dari kebijakan pelayanan publik bidang perizinan investasi merumuskan dan mengimplementasikan secara eksplisit AUPB di dalamnya, serta menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa produk-produk hukum daerah tersebut merupakan dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan layanan perizinan investasi di daerah yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dalam melayani warga negara. Supaya warga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tidak dirugikan haknya oleh tindakan aparat pemerintah daerah maka AUPB seyogyanya dirumuskan dan diimplementasikan secara rinci dalam produk-produk hukum daerah. Perumusan dan implementasi secara rinci AUPB dalam produk-produk hukum daerah dapat dipakai sebagai alat untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan dapat dipakai untuk mengurangi terjadinya tindakan KKN dan tindakan-tindakan tidak terpuji aparat di daerah lainnya. Pada akhirnya akan mengurangi kasus-kasus hukum akibat dari tindakankurang terpuji dari aparat pemerintah daerah yang dibawa ke ranah peradilan tata usaha negara dan laporan warga masyarakat terhadap kerugian yang dideritanya melalui Ombudsman Republik Indonesia. Di samping itu AUPB perlu dirumuskan secara eksplisit, terinci dan terurai dalam produk-produk hukum daerah kabupaten/kota di Indonesia karena daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia termasuk layanan publik di bidang perizinan investasi yang merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2. Rekomendasi Untuk Masyarakat (Pengguna Layanan Perizinan)

Seyogyanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) juga harus diindahkan dan dilaksanakan oleh warga masyarakat, termasuk sektor swasta yang baru mengurus perizinan investasi. Mengingat pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik pada sektor publik termasuk pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan investasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada umumnya dan utamanya pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan investasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, seharusnya tidak hanya dilaksanakan oleh aparat pemerintah, melainkan juga harus dilaksanakan oleh masyarakat dan sektor swasta. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di lapangan juga harus ada dukungan dari warga masyarakat dan sektor swasta dengan cara tidak melakukan KKN dengan aparat di daerah, agar aparat pemerintah di daerah tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adink, Henk Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, *Sourcebook HUMAN RIHGT & GOOD GOVERNANCE*, SIM Special, Utrecht, 2010.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua. Jakarta: Granit, 2005.
- Agus Dwiyanto, MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Cetakan ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arief Sidharta, Bernard. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum terhadap sikap tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah Diucapkan pada Dies Natalis XXIX Unpad pada Tanggal 24 September 1986, Cetakan Kedua. Bandung: Alumni, 1992.
- *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Ichtiar Baru-van Hoeve, tanpa tahun
- Belifante, A.D. & Burhanuddin Soetan Batoeah. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta, 1983.
- Brown, L. Neville and John S. Bell. *French Administrative Law*, Oxford New York: Clarendon Press, , 1998
- Daud Busroh, Abu. *Ilmu Negara*, Cetakan Keenam. Jakarta: Bina Aksara, 2009.
- Dicey, A.V. *Introduction To The Study Of The Law Of The Contitution*, Ninth Edition. London: Macmillan and Co, 1952.
- de Cruz, Peter. *Comparative Law in a Changing World*, Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- de Haan, P. dkk. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtstaat (Deel 1), Onwikkeling Organisatie, Instrumentarium*, Kluwer-Deventer, 1986.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

- Gie, The Liang. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia Jilid I*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia Jilid II*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty, 1994.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Gubernur Kedudukan, Peran dan Kewenangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hamidi, Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Henry, Nicholas. *Public Administration and Public Affairs* (Alih Bahasa: Luciana D. Lontoh. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*), Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali, 1988.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ian Ellis-Jones. *Essential Administrative Law*, Third Edition. Portland: Cavendish Publishing, 2003.
- Kaloh, J. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Cetakan Pertama, Bandung: Rineka Cita, 2002.
- Kelsen, Hans. *General Theori of Law and State*, alih bahasa Raisul Mutaqin *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Kelima. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Konijnenbelt, Willem. *Resume Hoofddlijnen van Adminisrtratief Recht*, Tweede Druk. Utrecht: LEMMA, 1990.
- Latief, Abdul. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Magnis Suseno, Frans. *Kuasa dan Moral*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- *Pijar-Pijar Filsafat*, Cetakan Keenam. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia, 1985.

- Mahfud MD, Moh.. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, 2009.
- , Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pusat studi Hukum FH UII, 2004.
- Manan, Bagir (editor). *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Radar Jaya, 1996.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marbun, SF dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Masthuri, Budhi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty, 1999
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*, alih bahasa M.Khozin *Sistem Hukum Perspektif Sosial*, Cetakan Ketiga. Bandung: Nusa Media, 2009.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Khusus, Surabaya: Peradaban, 2007.
- , ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- , *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan Pertama. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuh. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Mustafa, Bahsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Baki, 2001.
- N.E., Algra en Janssen H.C.J.G. *Rechtsingang Een Orientatie in Het Recht*. Groningen: H.D Tjeenk Willink, 1974.

- Nonet, Philippe & Philip Selnick. *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Nugraha, Safri, dkk. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Badan Penerbit Center For Law and Good Governance Studies FH UI, 2007.
- PJ. Suwarno. *HAMENGKU BUWONO IX DAN SISTEM BIROKRASI PEMERINTAHAN YOGYAKARTA Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rawls, John, *A Theory of Justice* Harvard University Press, Cambridge, massachusetts, 1995, alih bahasa Uzair Fauzan & Heru Prasetya, *Teori Keadilan, dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008.
- Sirajuddin dkk. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soehino. *Ilmu Negara*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty, 1991
- , *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Sri Pudyatmoko, Y. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Riwu Kaho, Josef. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ten Berge, J.B.J.M. dkk. *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, Amsterdam: Samsonm H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn, 1992.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keempat. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Wibisono, Kunto. *Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Wijoyo, Suparto (Editor). *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*, cetakan Pertama. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Wijk, Van en Willem Konijnenbelt. *Hoofdstukken van Adminnistratief Recht*. Vuga's- Gravenhage, 1968.

Desertasi, Laporan Penelitian, Artikel Ilmiah:

Ana Erliyana. *Keputusan Presiden: Analisis Keppres R.I 1987 – 1998. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.*

_____, *Algemene Bepalingen van Administrative Recht*, Rapport van de Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht vijfde geheel herziene druk. Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn, 1984

Lis Febrianda. *Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Desertasi. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2009.*

Safri Nugraha, dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Bidang Hukum Administrasi Negara. Jakarta: BPHN, 2006.*

Safri Nugraha dkk. *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI. 2007.*

SF. Marbun. *Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia, Desertasi. Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD, 2001.*

Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam rangka Pembuatan Undang-undang Berkelanjutan, Desertasi. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2007.*

Peraturan Perundang-undangan Pusat

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Di Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi.

Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomo 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Terhadap Investasi pada Tahun 2009 di Kota Yogyakarta

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Kemudahan dan Keringanan Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta 2008.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi toko Modern.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanaman Modal di Daerah.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern.

Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 Tahun 2013 tentang pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.

Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 297 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Operasional Pelayanan (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Surat Keputusan Bupati Sleman No. 07a/Kep.KDH/2003 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran IMB.

Surat Keputusan Bupati Sleman No. 5/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi IMB.

Laman/internet:

Seminar Hasil Kajian Model Kelembagaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Bidang air Bersih, Kebersihan dan Ruang Publik, tahun 2008, Diakses dari www.bappenas.go.id, tanggal akses 21 April 2011.

Hasil Penelitian Pelayanan Publik Di Era Desentralisasi, Bappenas. Diakses dari www.bappenas.go.id, tanggal akses 4 Januari 2012.

Ombudsman dan Reformasi Birokrasi. Diakses dari www.republika.co.id., tanggal akses 22 April 2011.

Mardiasmo, Diaswati and Barnes, Paul, and Sakurai, Yuka, 2008. *Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges*. Proceedings Contemporary Issues in Public Management: The Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM XII), pages pp.1-36, Brisbane, Australia. Diakses dari QUT Digital Repository: - <http://eprints.qut.edu.au/> tanggal 6 April 2014.

Lampiran 1

CHEK LIS LEMBAR OBSERVASI

Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai UU Pelayanan Publik dalam Pelayanan Perijinan Investasi

Kabupaten/Kota.....

No	Asas	Pelaksanaan			
		Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Kepentingan umum				
2	Kepastian hukum				
3	Kesamaan hak				
4	Keseimbangan hak dan kewajiban				
5	Keprofesionalan				
6	Partisipatif				
7	Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif				
8	Keterbukaan				
9	Akuntabilitas				
10	Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan				
11	Ketepatan waktu				
12	Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan				

Catatan: Mohon dicermati & diamati apakah dalam pelaksanaan pelayanan perijinan investasi para petugas sudah mengindahkan **asas kepentingan umum** seperti telah sesuai dengan nomor urut antrian, **asas kepastian hukum**, **asas kesamaan hak** (tidak membedakan warna kulit, suku, ras, dan laki-laki/perempuan), **asas keseimbangan hak dan kewajiban** (seperti lama waktu), **asas keprofesionalan** (misalnya petugas melayani dengan baik, ramah, sopan dan terlihat terampil serta cekatan, memberikan penjelasan dengan baik), **asas partisipatif**, **asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif** (seperti tidak

Nama Pengamat:

ttd

.....

[illegible]

**Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai
UU Administrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Perijinan Investasi
Kabupaten/Kota.....**

No	Asas	Pelaksanaan			
		Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	kepastian hukum				
2	kemanfaatan				
3	ketidakberpihakan				
4	kecermatan				
5	tidak menyalahgunakan kewenangan				
6	keterbukaan				
7	kepentingan umum				
8	pelayanan yang baik				

Catatan: Mohon dicermati & diamati apakah dalam pelaksanaan pelayanan perijinan investasi para petugas sudah mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan AUPB yang tertuang dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan antara lain asas: **kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.** Cermati juga maklumat pelayanan apakah sudah jelas, tarif, prosedur pelayanan, alur pelayanan perijinan, maklumat pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan. Cermati apakah para petugas melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen persyaratan perizinan secara cermat, memberikan keterangan-keterangan secara jelas khususnya untuk petugas humas (bagian informasi) bila ada pengguna layanan yang menanyakan sesuatu informasi yang berkaitan dengan perizinan investasi. Cermati juga apakah petugas pelayanan memberikan pelayanan secara baik, seperti: ramah, sopan, santun dan sikap-sikap yang baik lainnya.
Berikan catatan-catatan pada lembar pengamatan anda.

(Tuliskan nama pengamat, tgl/bln pengamatan dan tanda tangan).

Nama Pengamat:

Yogyakarta,.....

ttd

.....

[illegible]

Lampiran 2

KUSIONER UNTUK MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PERIJINAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA DI DIY

Ketua Tim Peneliti:

**Eny Kusdarini, SH, M, Hum
(Dosen FIS UNY)**

Pengantar:

Bbk/Ibu/Saudara pengguna layanan perizinan investasi mohon bantuan pengisian kusioner dalam rangka penelitian yang kami lakukan dengan judul “Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di DIY” pada kolom yang tersedia berikut ini. Kerahasiaan pengisian kusioner akan dijaga, sehingga mohon diisi dengan benar dan seobjektif mungkin. Tujuan Penelitian ini adalah saran-saran untuk perbaikan layanan perizinan investasi di DIY.

Adapun cara pengisian dengan menuliskan nama Bapak/Ibu/Saudara (apabila berkenan untuk menyebutkan nama kalau tidak berkenan nama tidak usah diisi) beserta alamat dan identitas lain pada kolom yang telah di sediakan. Di samping itu juga diharapkan Bapak/Ibu/Saudara mengisi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dengan cara melingkari alternatif jawaban yang tersedia atau mengisi alternatif jawaban lain sesuai keadaan yang sebenarnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kusioner ini kami mengucapkan terima kasih

Ketua Tim Peneliti

Eny Kusdarini

No. Responden:

A. Identitas Responden:

1. Nama Bapak/Ibu/Saudara:
2. Alamat & Nomor telp/HP Bapak/Ibu/Saudara:
 - a. Alamat.....
 - b. No telp/HP.....
3. Jenis kelamin:
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Pendidikan terakhir :
 - a. S3
 - b. S2
 - c. S1
 - d. D3
 - e. SMA dan/atau yang Sederajat
 - f. SMP dan/atau yang Sederajat
 - g. SD dan/atau yang sederajat
5. Agama :
 - a. Islam
 - b. Katolik
 - c. Protestan
 - d. Hindu
 - e. Budha
 - f. Lainnya(mohon sebutkan)
6. Jenis perizinan investasi yang dimohon.....(mohon sebutkan bisa lebih dari satu:
 - a.
 - b.
 - c.Dst.....

B. Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pelayanan Perizinan Investasi (mohon dipilih salah satu jawaban)

7. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimanakah pelayanan yang dilakukan oleh petugas dalam melayani pengurusan perizinan investasi?
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e.
8. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara bagaimana keadilan dalam mendapatkan pelayanan dari para petugas?, (misalnya: pelaksanaan

pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani dan sesuai nomor urut antrian)

- a. Sangat adil
- b. Cukup adil
- c. Kurang adil
- d. Tidak adil
- e.

9. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah para petugas pelayanan perijinan investasi sudah memperhatikan asas kepentingan umum dalam arti mengedepankan kepentingan pengguna layanan dibanding dengan kepentingan sendiri?

- a. Sangat mengindahkan kepentingan umum
- b. Cukup mengindahkan kepentingan umum
- c. Kurang mengindahkan kepentingan umum
- d. Tidak mengindahkan kepentingan umum
- e.

10. Menurut bapak/ibu/saudara, adakah keseimbangan antara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pengguna layanan dan hak yang diterima oleh pengguna layanan? (seperti syarat-syarat permohonan yang harus dipenuhi, biaya yang dikeluarkan sudah sebanding dengan hak yang bapak/ibu/saudara peroleh)

- a. Sangat seimbang dan sebanding
- b. Cukup seimbang dan sebanding
- c. Kurang seimbang dan sebanding
- d. Tidak seimbang dan sebanding
- e.

11. Apakah para petugas dalam melakukan pelayanan sudah melaksanakannya secara profesional?

- a. Sangat profesional
- b. Cukup profesional
- c. Kurang profesional
- d. Tidak profesional
- e.

12. Apakah para petugas dalam melayani bapak/ibu/saudara mengurus perijinan melakukannya dengan hormat:

- a. Sangat hormat
- b. Cukup hormat
- c. Kurang hormat
- d. Tidak hormat
- e.

13. Apakah para petugas dalam melayani bapak/ibu/saudara mengurus perijinan melakukannya dengan santun?

- a. Sangat santun
- b. Cukup santun

- c. Kurang santun
 - d. Tidak santun
 - e.
14. Apakah para petugas dalam melayani bapak/ibu/saudara mengurus perijinan melakukannya ramah?
- a. Sangat ramah
 - b. Cukup ramah
 - c. Kurang ramah
 - d. Tidak ramah
 - e.
15. Apakah prosedur perijinan diumumkan dengan jelas dan transparan (misalnya dipasang pada papan pengumuman atau maklumat pelayanan termasuk alur pelayanan perijinan sudah diumumkan dengan baik dan benar)?
- a. Sangat jelas dan transparan
 - b. Cukup jelas dan transparan
 - c. Kurang jelas dan transparan
 - d. Tidak jelas dan transparan
 - e.
16. Apakah fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana fisik di instansi ini sudah mengindahkan perlakuan khusus bagi defabel (orang cacat fisik) golongan usia tua dan kelompok rentan lainnya?
- a. Sangat mengindahkan kelompok rentan
 - b. Cukup mengindahkan kelompok rentan
 - c. Kurang mengindahkan kelompok rentan
 - d. Tidak mengindahkan kelompok rentan
 - e.
17. Apakah biaya pengurusan izin investasi yang bapak/ibu/saudara bayarkan diberitahukan secara transparan. Dalam arti tarif-tarif biaya pelayanan sudah diumumkan dan bapak/ibu/saudara membayar sesuai dengan tarif yang diumumkan?
- a. Sangat transparan
 - b. Cukup transparan
 - c. Kurang transparan
 - d. Sama sekali tidak transparan
 - e.
18. Menurut bapak/ibu/saudara apakah besarnya biaya pengurusan perijinan sebanding dengan hasil perijinan usaha yang bapak/ibu/saudara urus?
- a. Sangat sebanding
 - b. Cukup sebanding
 - c. Kurang sebanding
 - d. Tidak sebanding
 - e.

19. Menurut bapak/ibu/saudara dalam pengurusan ijin investasi ini ada kesesuaian waktu yang telah diumumkan?
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Kurang sesuai
 - Sama sekali tidak sesuai
 -
20. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah prosedur pelayanan di dalam perolehan perijinan investasi cukup mudah untuk dipahami para pengguna layanan?
- Sangat mudah untuk dipahami
 - Cukup mudah untuk dipahami
 - Kurang mudah untuk dipahami (berbelit-belit)
 - Tidak mudah untuk dipahami (sangat berbelit-belit)
 -
21. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah prosedur pelayanan di dalam perolehan perijinan investasi cukup sederhana?
- Sangat sederhana
 - Cukup sederhana
 - Kurang sederhana (cukup berbelit-belit)
 - Tidak sederhana (sangat berbelit-belit)
 -
22. Menurut bapak/ibu/saudarabagaimana kedisiplinan petugas pelayanan dalam melayani para pengguna jasa? (seperti: kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku)?
- Sangat disiplin
 - Cukup disiplin
 - Kurang disiplin
 - Tidak disiplin
 -
23. Apakah maklumat/pengumuman terkait dengan proses alur pelayanan perijinan sudah cukup jelas bagi para pengguna jasa layanan?
- Sangat jelas
 - Cukup jelas
 - Kurang jelas
 - Tidak jelas
 -
24. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara dalam hal kewajaran biaya pelayanan, (seperti: keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan)?
- Sangat terjangkau
 - Cukup terjangkau
 - Kurang terjangkau

- d. Tidak terjangkau
 - e.
25. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana kecepatan pelayanan yang dilakukan oleh para petugas?(dari sisi target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan)?
- a. Sangat cepat
 - b. Cukup cepat
 - c. Kurang cepat
 - d. Tidak cepat
 - e.
26. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana keamanan pelayanan, apakah sudah cukup terjamin dari sisi keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga pengguna layanan merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan?
- a. Sangat terjamin
 - b. Cukup terjamin
 - c. Kurang terjamin
 - d. Tidak terjamin
 - e.
27. Apakah bapak/ibu/saudara dapat mengakses dengan mudah informasi mengenai pelayanan yang dibutuhkan?
- a. Sangat mudah dalam mengakses informasi
 - b. Cukup mudah dalam mengakses informasi
 - c. Kurang mudah dalam mengakses informasi
 - d. Tidak mudah dalam mengakses informasi
 - e.
28. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana kenyamanan lingkungan, apakah kondisi sarana dan prasarana pelayanan bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan?
- a. Sangat nyaman
 - b. Cukup nyaman
 - c. Kurang nyaman
 - d. Tidak nyaman
 - e.
29. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sudah sesuai dengan jenis pelayanannya?
- a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai
 - e.

30. Menurut Bapak/ibu/saudara, apakah terjadi diskriminasi dalam pelayanan publik yang bapak/ibu/saudara rasakan selama anda mengurus perijinan investasi?
- Sangat diskriminasi
 - Cukup ada diskriminasi
 - Tidak ada diskriminasi
 -
31. Bagaimana kepastian jadwal pelayanan? Apakah pelaksanaan waktu pelayanan sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan:
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Kurang sesuai
 - Tidak sesuai
 -
32. Menurut Bapak/ibu/saudara bagaimanakah kepastian biaya pelayanan, apakah sudah sesuai antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan?
- Sangat sesuai
 - Cukup sesuai
 - Kurang sesuai
 - Tidak sesuai
 -
33. Menurut Bapak/ibu/saudara, apakah pengaduan dari para pengguna layanan perizinan ditanggapi secara baik oleh petugas yang berkompeten?
- Sangat ditanggapi dengan baik
 - Cukup ditanggapi dengan baik
 - Kurang ditanggapi dengan baik
 - Tidak ditanggapi dengan baik
 -
34. Menurut Bapak/ibu/saudara apakah para petugas memberikan kemudahan dalam layanan pengurusan peijinan investasi?
- Sangat memberikan kemudahan
 - Cukup memberikan kemudahan
 - Kurang memberikan kemudahan
 - Tidak memberikan kemudahan
 -
35. Menurut Bapak/ibu/saudara apakah biaya yang diperlukan dalam pengurusan perijinan investasi cukup terjangkau?
- Sangat terjangkau
 - Cukup terjangkau
 - Kurang terjangkau
 - Tidak terjangkau
 -

36. Menurut Bapak/ibu/saudara apakah para petugas pelayanan perijinan investasi sudah memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan pengguna layanan?
- a. Sangat memperhatikan
 - b. Cukup memperhatikan
 - c. Kurang memperhatikan
 - d. Tidak memperhatikan
 - e.

Saran-saran terhadap pelaksanaan perizinan investasi yang Bapak/Ibu/Saudara mohon ke instansi ini:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

Terima Kasih

Lampiran 3

Berita Acara Seminar Hasil Penelitian.

	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA			
	BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN			
	No. FRM/LPPM-PNL/314	Revisi : 00	Tgl 1 September 2014	Hal 1 dari 2

1. Nama Peneliti : Eny Kusdarini, Ir. Hum
 2. Jurusan/Prodi : Hukum
 3. Fakultas : FIS
 4. Skim Penelitian : Pengantar Doktor
 5. Judul Penelitian : Implementasi asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik
 6. Pelaksanaan : Tanggal 6/4/15 Jam 14.00 - Selesai
 7. Tempat : Ruang Sidang LPPM, Universitas Negeri Yogyakarta
 8. Dipimpin oleh : Ketua Dr. Widarto, S.Pd
Sekretaris Dr. Enny Subaidah
 9. Peserta yang hadir : a. Konsultan : orang
b. Nara sumber : orang
c. BPP : orang
d. Peserta lain : 12 orang
- Jumlah : 17 orang

SARAN-SARAN

1. Asas pemerintahan yang baik itu seperti apa? Kriteria sudah ada? Bagaimana membuktikan sistem pelayanan saat ini yang baik?
2. Rumusan masalah dan implementasinya mengapa disatukan?
3. Perlu dicermati antara penelitian dan disertai, terutama dalam sistematika penulisannya.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/314

Revisi : 00

Tgl 1 September 2014

Hal 2 dari 2

10. Hasil Seminar;

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tulis, seminar berkesimpulan: hasil penelitian tersebut di atas:












- Diterima, tanpa revisi/pembenahan usulan/instrumen/hasil
- Diterima, dengan revisi/pembenahan
- Dibenahi untuk diseminarkan ulang

Ketua Sidang

Mengetahui
Reviewer Internal
Penelitian

Sekretaris Sidang

[Signature]
Dr. Widianto, Il. pd. Dr. Suryanto, Il. Si Dr. Emy Lubaidah
NIP: 19631230 198812 2001 NIP: 1960508 1992031 002 NIP: 195808 22 198409 2001

NO.	NAMA	FAK	SKIM	TANDA TANGAN
51	Agus Basuki, M.Pd.	FIP	Penelitian Disertasi Doktor	51 
52			Anggota	52
53	Dr. Farida Agus Setiawati, S.Psi., M.Si.	FIP	Penelitian Fundamental	53 
54			Anggota	54
55	Dr. Rita Eka Izzaty, S.Psi., M.Si.	FIP	Penelitian Strategis Nasional	55 
56			Anggota	56
57	Dyna Herlina Suwanto, SE., M.Sc.	FIS	Ipteks Bagi Masyarakat	57 
58			Anggota	58
59	Eny Kusdarini, SH., M.Hum.	FIS	Penelitian Disertasi Doktor	59 
60			Anggota	60
61	Dra. V. Indah Sri Pinasti, M.Si.	FIS	Penelitian Fundamental	61 
62			Anggota	62 
63	Dr. Cahyorini Kusumawardani, M.Si.	FMIPA	Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional	63
64			Anggota	64
65	Dr. Tien Aminatun, S.Si., M.Si.	FMIPA	Penelitian Fundamental	65 
66			Anggota	66
67	Prof. Dr. Bambang Subali, MS.	FMIPA	Penelitian Kompetensi	67 
68			Anggota	68
69	Prof. Dr. Djukri, M.S.	FMIPA	Penelitian Tim Pasca Sarjana	69 
70			Anggota	70
71	Restu Widiatmono, S.Si., M.Si.	FMIPA	Penelitian Disertasi Doktor	71
72			Anggota	72
73	Supardi, S.Si., M.Si.	FMIPA	Penelitian Disertasi Doktor	73
74			Anggota	74
75	Bambang Ruwanto, M.Si.	FMIPA	Penelitian Fundamental	75 
76			Anggota	76
77	Dr. Dadan Rosana, M.Si.	FMIPA	Penelitian Kompetensi	77
78			Anggota	78

D:\TAUFIK 2015\PENELITIAN 2015\daftar hadir seminar hasil penelitian & ppm dana dikti 2015

NO.	NAMA	FAK	SKIM	TANDA TANGAN
135	Drs. Edy Purnomo, M.Pd.	FT	Ipteks Bagi Produk Ekspor	135 
136			Anggota	136
137	Aan Ardian, S.Pd., M.Pd.	FT	Ipteks Bagi Produk Ekspor	137 
138			Anggota	138
139	Drs. Darmono, M.T.	FT	Ipteks Bagi Produk Ekspor	139 
140			Anggota	140 
141	Nani Ratnaningsih, STP., MP.	FT	Penelitian Disertasi Doktor	141 
142			Anggota	142

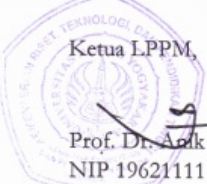
Ketua LPPM,

Prof. Dr. Anik Ghufro
NIP 19621111 198803 1 001



Hari / Tgl. : JUM'AT / 6 November 2015
 Waktu : 13.00 WIB - selesai
 Tempat : Gedung LPPM UNY Lt. 2

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Anik Ghufon, M.Pd.	Ka. LPPM	1
2	Dr. Widarto, M.Pd.	Sekr. LPPM	2
3	Dr. Suyanta, M.Si	Reviewer	3
4	Dr. Ariswan, M.Si. DEA	Reviewer	4
5	Dr. Edi Purwanta, M.Pd.	Reviewer	5
6	Prof. Pardjono, Ph.D	Reviewer	6
7	Dr. Hastuti, M.Si	Reviewer	7
8	Dr. Mujiyono, M.T	Reviewer	8
9	Prof. Dr. C. Asri Budiningsih	Reviewer	9
10	Prof. Dr. Tomolius, MS	Reviewer	10
11	Dr. Sari Rudiwati, M.Pd.	Reviewer	11
12	Dr. Widarto, M.Pd.	Reviewer	12
13	Dr. Enny Zubaidah, M.Pd	Notulis	13
14	Dr. Tien Aminatun, M.Si.	Notulis	14
15	Dr. Widiyanto, M.Kes.	Notulis	15
16	Dr. Giri Wiyono, MT.	Notulis	16
17	Dr. Kokom Komariah, M.Pd	Notulis	17


 Ketua LPPM,
 Prof. Dr. Anik Ghufon
 NIP 19621111 198803 1 001